



Desa Wisata

Menunjang Transformasi Ekonomi Nasional di Kabupaten Enrekang

Ahmad Jumarding
Andi Arifuddin Mane
Misbahuddin
Abdul Karim

Desa Wisata

**Menunjang
Transformasi
Ekonomi Nasional
di Kabupaten
Enrekang**

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Desa Wisata

Menunjang Transformasi Ekonomi Nasional di Kabupaten Enrekang

Ahmad Jumarding
Andi Arifuddin Mane
Misbahuddin
Abdul Karim

Diterbitkan oleh
Nas media Pustaka
Tahun 2021

Desa Wisata Menunjang Transformasi Ekonomi Nasional di Kabupaten Enrekang

**Ahmad Jumarding
Andi Arifuddin Mane
Misbahuddin
Abdul Karim**

Copyright © A. Jumarding, Dkk 2021
All rights reserved

Layout : Muh Taufik
Desain Cover : Muh Taufik
Image Cover
Freepik.com

Cetakan Pertama, November 2021
xii + 100 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-623-351-259-6

Diterbitkan oleh Penerbit Nas Media Pustaka

PT. Nas Media Indonesia

Anggota IKAPI

No. 018/SSL/2018

Jl. Batua Raya No. 3, Makassar 90233

Jl. Kenari Indah No. 2, Yogyakarta 55584

Telp. 0812-1313-3800

redaksi@nasmedia.id

www.nasmediapustaka.co.id

www.nasmedia.id

Instagram : @nasmedia.id

Fanspage : nasmedia.id

Dicetak oleh Percetakan CV. Nas Media Pustaka

Isi di luar tanggung jawab percetakan

PRAKATA

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan buku “*Desa Wisata Menunjang Transformasi Ekonomi Nasional di Kabupaten Enrekang*”. Buku ini merupakan hasil penelitian di Kabupaten Enrekang tahun 2021. Sejalan dengan rancangan kebijakan dari Bappenas RI untuk tahun 2022 dalam Transformasi Ekonomi Nasional sebagai pengejawantahan dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut mendasari para penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Enrekang dalam upaya mengkaji dan menganalisis potensi ekonomi berbasis desa wisata di Kabupaten Enrekang.

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat, bahkan pariwisata dikatakan mempunyai *energy trigger* yang luar biasa, yang membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam berbagai aspeknya. Berbagai dampak yang dinilai positif, hampir semua penelitian juga menunjukkan adanya dampak yang tidak diharapkan, seperti semakin buruknya kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat, memburuknya ketimpangan ekonomi, dan lain-lain.

Sementara itu banyak pakar yang mengadari bahwa pariwisata, meskipun membutuhkan lingkungan yang baik, namun bila mana dalam pengembangannya tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan kerentanan lingkungan terhadap jumlah wisatawan menimbulkan dampak negatif. Dengan tingginya wisatawan yang berkarakter *Nature Based*, pada satu sisi sangat positif dan berman-

faat, namun pada sisi lain terlihat belum adanya pendalaman terhadap fungsi lingkungan atau masih banyak masyarakat yang belum sadar pentingnya “*Nature Related Tourism*”.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, 01 November 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KONSEP PARIWISATA.....	6
A. Konsep Desa Wisata.....	7
B. Tujuan Desa Wisata dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	9
C. Sasaran Pengembangan Desa Wisata	11
D. Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata	12
E. Pendekatan Kawasan Desa Wisata di Bumi	
Massenrempulu	13
1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	16
2. Pemberdayaan Sosial Budaya	17
3. Pemberdayaan Lingkungan Desa wisata	18
4. Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	20
BAB III HASIL PENELITIAN	22
A. Karakteristik Responden.....	22
1. Alamat Responden	22
2. Usia Responden.....	23
3. Pendidikan Responden	24
4. Pekerjaan Responden	24
5. Jenis Kelamin Responden	26

B. Deskriptif Tanggapan Responden	26
1. Hasil tanggapan responden tentang potensi wisata desa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang.....	27
2. Hasil tanggapan responden tentang peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat desa	39
BAB IV PEMBAHASAN	48
A. Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata	48
B. Tipologi dan Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal.....	52
1. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata.....	56
2. Peran Desa Wisata dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	60
3. Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	64
4. Peningkatan Daya Saing Desa Berbasis Kebijakan <i>Local Economic Development (LED)</i>	75
5. Peran Teknologi dalam Pengembangan Desa Berbasis <i>Website</i>	83
PENUTUP.....	89
DAFTAR	93
PUSTAKA.....	93
TENTANG PENULIS.....	99

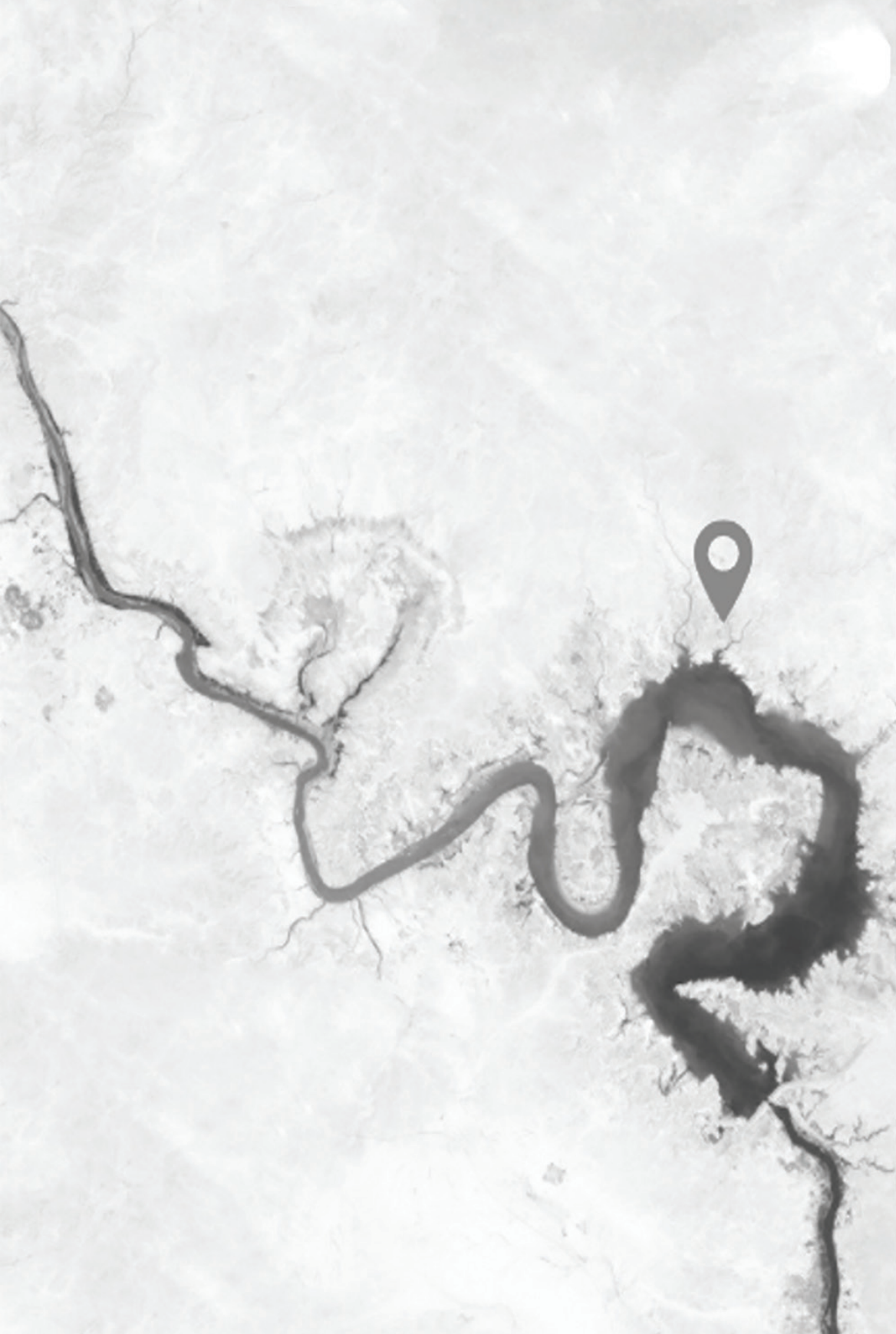
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kajian Teori Komponen Desa Wisata.....	8
Tabel 2. Pendekatan Kawasan Desa Wisata di Massenrempulu.....	13
Tabel 3. Daftar Destinasi Desa Wisata di Kabupaten Enrekang.....	32
Tabel 4. Tabulasi Hasil Tanggapan Responden Tentang Potensi Desa Wisata Menunjang Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Enrekang.....	37
Tabel 5. Tabulasi Hasil Tanggapan Responden Tentang Potensi Pendapatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pariwisata.....	45
Tabel 6. Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata.....	49
Tabel 7. Perbedaan Desa Non-Wisata dengan Desa Wisata.....	51
Tabel 8. Perbedaan Klasifikasi Desa Wista.....	53
Tabel 9. Uraian Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata	55
Tabel 10. Pola Hubungan Sosial Masyarakat Desa dengan Ekstrinsik dan Intrinsik	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alamat Responden	22
Gambar 2.	Usia Responden	23
Gambar 3.	Pendidikan Responden	24
Gambar 4.	Pekerjaan Responden.....	25
Gambar 5.	Jenis Kelamin Responden.....	26
Gambar 6.	Obyek Pariwisata Memberikan Manfaat Ekonomi	27
Gambar 7.	Obyek Desa Wisata dapat Dikembangkan.....	28
Gambar 8.	Promosi Wisata sebagai Program Unggulan Daerah	29
Gambar 9.	Obyek Wisata dapat Dikelola Sendiri oleh Masyarakat Desa	30
Gambar 10.	Obyek Wisata sebagai Media Sosialisasi.....	31
Gambar 11.	Masyarakat Lokal Menjadi Pemandu Wisata pada Desanya	32
Gambar 12.	Dana Desa atau ADD Dialokasikan 25% pada Peningkatan Obyek Wisata.....	35
Gambar 13.	Jumlah Obyek Desa Wisata dapat Dikembangkan Setiap Desa.....	36
Gambar 14.	Obyek Wisata Menambah Penghasilan Masyarakat	39
Gambar 15.	Obyek Wisata Membuka Peluang Pekerjaan.....	40
Gambar 16.	Obyek Wisata dalam Peningkatan PAD	40
Gambar 17.	Obyek Wisata Membuka Peluang untuk Berdagang	41
Gambar 18.	Obyek Wisata Menciptakan Peluang Usaha	42
Gambar 19.	Obyek Wisata Penggerak Ekonomi Desa	43

Gambar 20. Obyek Wisata dapat Menarik Investor untuk Berinvestasi.....	43
Gambar 21. Obyek Desa Wisata dapat Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara.....	44
Gambar 22. Alur Proses Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata.....	57
Gambar 23. Pemasalahan Masyarakat Desa dalam Bidang Ekonomi.....	62
Gambar 24. Pola Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Wisata.....	66
Gambar 25. Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan.....	69
Gambar 26. Sinergi Kebijakan LED dan Pembangunan Pedesaan dalam Peningkatan Daya Saing.....	80
Gambar 27. Alasan Ketidakpuasan Masyarakat dalam Pengelolaan Lembaga Ekonomi Desa.....	82
Gambar 28. Skema Pengembangan Desa melalui Informasi dan Teknologi Berbasis <i>Website</i>	85



BAB I

PENDAHULUAN

Sejalan dengan dinamika, gerak perkembangan pariwisata merambah dalam berbagai terminologi seperti, *sustainable tourism development*, *village tourism*, *ecotourism*, merupakan pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata (Karim, 2019). Ramuan utama desa wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut. Pemodelan desa wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah.

Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Enrekang terletak \pm 235 KM sebelah utara Makassar. Secara geografi Kabupaten Enrekang terletak pada koordinat antara $3^{\circ} 14' 36''$ sampai $3^{\circ} 50' 00''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 40' 53''$ sampai $120^{\circ} 06' 33''$ Bujur Timur. Dengan luas wilayah sebesar 1.786,01KM² (BPS, 2019). Kabupaten Enrekang mempunyai batas-batas wilayah, (Kompas, 2015) sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja;
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu;
3. Sebelah Timur : Kabupaten Sidrap; dan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang.

Topografi Wilayah Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan,

lembah dan sungai dengan ketinggian 47 - 3.293 M dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%, (Karim, A. 2020).

Pengembangan daerah yang mayoritas penduduknya tergantung pada sektor pertanian merupakan suatu kebijakan pembangunan pedesaan yang diadakan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan industri berdasarkan potensi ekonomi lokal pedesaan. Sasaran utama yang ingin dicapai melalui penerapan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk pakaian dan makanan untuk nilai produksi berbasis konsumsi dan potensi sektor basis daerah pedesaan, serta realisasi keharmonisan. Pembangunan ekonomi antar daerah, antara Kota dan Daerah pedesaan di berbagai daerah, (Karim, 2021).

Selama setengah dasawarsa terakhir telah terjadi perubahan wilayah administrasi pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun level desa/kelurahan. Pada Tahun 1995 di Kabupaten Enrekang hanya terdapat 54 desa/kelurahan yang tersebar pada 5 kecamatan. Dengan adanya perubahan situasi dan kondisi wilayah, maka pemekaran desa/kelurahan sudah menjadi keharusan. Maka pada tahun 1997, jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Enrekang telah bertambah dari 78 desa/kelurahan kondisi tahun 1996, menjadi 108 desa/kelurahan. Demikian halnya pada tingkat kecamatan, yang semula hanya 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan. Pada pertengahan tahun 2003 terjadi pemekaran sehingga bertambah lagi sebanyak 3 desa menjadi 111 desa/kelurahan. Kemudian pada akhir tahun 2006 terjadi pemekaran desa dan kecamatan menjadi 11 kecamatan dan 112 desa/kelurahan. Terakhir pada tahun 2008 mekar kembali menjadi 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan, (BPS, Enrekang. 2020).

Kabupaten Enrekang memiliki 12 Kecamatan, sementara kecamatan terluas adalah Kecamatan Maiwa yaitu 392,87 KM² atau 22 persen dari luas Kabupaten Enrekang, sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Alla yaitu 34,66 KM² atau 1,94 persen dari luas Kabupaten Enrekang. Ditinjau dari kerangka pengembangan wilayah maupun secara geografis Kabupaten Enrekang juga dapat dibagi kedalam dua kawasan yaitu Kawasan Barat Enrekang (KBE) dan Kawasan Timur Enrekang (KTE). KBE meliputi Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana, sedangkan KTE meliputi Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa. Luas KBE kurang lebih 659,03 KM² atau 36,90% dari Luas Kabupaten Enrekang sedangkan luas KTE kurang lebih 1.126,98 KM² atau 63,10% dari Luas wilayah Kabupaten Enrekang, (BPS Enrekang, 2020).

Pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi prioritas utama saat ini, selain karena faktor viral atau sesuatu yang menjadi perbincangan di khalayak umum, banyak permasalahan seperti rendahnya pendapatan daerah yang dihadapi sehubungan dengan pembangunan dibidang ekonomi. Pembangunan ekonomi yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan telah berhasil memperbaiki kondisi perekonomian baik dalam skala daerah atau kolaborasi berbagai pihak dalam peningkatan ekonomi daerah yang mampu memberikan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Perbaikan kondisi perekonomian tersebut dapat ditempuh dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam pembangunan, karena sumber daya manusia yang rendah menjadikan kondisi masyarakat kurang mampu dalam melihat serta mengatasi masalah dalam hidupnya yang kemudian akan berdampak pada pengangguran dan kemiskinan, oleh karena itu pengembangan maupun pemberdayaan manusia dan pemanfaatan potensi alam, merupa-

kan hal yang harus dan perlu dilakukan.

Dilihat dari aktifitas perekonomian, tampak ada perbedaan signifikan antara kedua wilayah tersebut. Pada umumnya aktifitas perdagangan dan industri berada pada wilayah Kawasan Barat Enrekang (KBE). Selain itu industri jasa seperti transportasi, telekomunikasi, hotel, restoran, perbankan, perdagangan industri pengolahan hasil pertanian berpotensi dikembangkan di wilayah tersebut. Sedangkan Kawasan Timur Enrekang (KTE) yang selama ini dianggap relatif tertinggal bila dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi, sangat memadai dari segi potensi SDA, sehingga amat potensial untuk pengembangan pertanian dalam arti yang Wilayah Aliran Sungai (WAS) yaitu pertanian tanaman pangan/ hortikultura, perkebunan dan pengembangan hutan rakyat.

Pariwisata berbasis masyarakat desa sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yakni pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development paradigma*). Pengembangan wisata desa berbasis masyarakat (*Community Based Tourism-CBT*) merupakan model pengembangan wisata yang mengedepankan peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata desa (Akbar & Sihalo, 2019).

Penelitian ini dilakukan dalam rangka pengembangan desa wisata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal sangat perlu dilakukan sebagai langkah evaluasi dan langkah preventif dalam menentukan langkah pengembangan selanjutnya karena pengembangan desa wisata memiliki karakter aktivitas yang bersifat *multisectoral*. Pelaksanaan pengembangan pariwisata harus terencana secara terpadu dengan pertimbangan-pertimbangan terutama terhadap aspek ekonomi dan sosial-budaya masyarakat lokal (Alfada, 2019). Pada setiap tahapan pengembangan tersebut, pelaku pariwisata hendaknya dapat meminimalisasi sebanyak mungkin dampak negatif yang

timbul serta berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian dan sosial-budaya masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga sebagai salah satu upaya kontrol pembangunan ekonomi berbasis kepariwisataan, khususnya pada wilayah Kabupaten Enrekang.

BAB II

KONSEP PARIWISATA

Pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian yang perlu diberi perhatian lebih agar dapat berkembang dengan baik. Indonesia saat ini sektor pariwisata mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini terlihat pada semakin banyaknya tempat wisata yang ditawarkan. Setiap daerah mencoba menciptakan model wisata yang unik yang diharapkan dapat menarik minat para wisatawan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan peluang pasar yang menjanjikan karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya pada wilayah pedesaan di Kabupaten Enrekang (Maddatuang dkk, 2020).

Pariwisata yang bertumbuh di suatu daerah tidak hanya memberikan implikasi bagi peningkatan ekonomi daerah tersebut tetapi juga berimplikasi terhadap sosial budaya dan lingkungan sekitarnya. Pariwisata merupakan suatu kegiatan wisata sebagai kebutuhan manusia yang terwujud dalam keterkaitan kegiatan yang dilakukan wisatawan dengan fasilitas dan pelayanan dari masyarakat, pemerintah dan swasta (Rahman, 2021).

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang RI No.10 Tahun 2009). Sebagai sebuah konsep pariwisata dapat ditinjau dari berbagai segi yang berbeda. Pariwisata dapat dilihat sebagai suatu kegiatan melakukan perjalanan dari rumah dengan

maksud tidak melakukan usaha atau bersantai. Pariwisata juga dapat dilihat sebagai suatu bisnis yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa bagi wisatawan dan menyangkut setiap pengeluaran oleh atau untuk pengunjung dalam perjalanannya (Handayani & Badrudin, 2019).

Sejalan dengan dinamika, gerak perkembangan pariwisata merambah dalam berbagai terminologi seperti, *sustainable tourism development*, *rural tourism*, *ecotourism*, merupakan pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata (Titi & Sri, 2020).

A. Konsep Desa Wisata

Wisata dengan pesona alam pedesaan saat ini menjadi alternatif pilihan wisata yang banyak dilirik oleh wisatawan, baik lokal maupun wisatawan mancanegara. Wisatawan lebih memilih berwisata ke desa karena desa memberikan nuansa lain yang selama ini tidak ditemukan pada wisata modern. Wisata ke desa kemudian melahirkan konsep yang disebut desa wisata. Desa wisata yaitu sebuah kawasan yang berkaitan dengan wilayah atau berbagai kearifan lokal (adat-istiadat, budaya, potensi, yang dikelola sebagai daya tarik wisata sesuai dengan kemampuannya, yang ditujukan untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat) (Theng, 2015).

Local wisdom atau sistem pengetahuan lokal yang dimaksud disini adalah pengetahuan yang khas yang merupakan milik suatu masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang sekian lama, sebagai hasil dari proses hubungan timbal balik antara penduduk dengan lingkungannya (Sukirman, 2017). Meningkatnya minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata yang menawarkan

alam pedesaan merupakan peluang pasar yang sangat menjanjikan dalam mengembangkan desa wisata.

Pengembangan desa wisata akan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi desa dan masyarakatnya. Peluang ini seharusnya ditangkap oleh pemerintah desa dan masyarakatnya untuk meningkatkan ekonominya melalui pengembangan desa wisata. Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang menawarkan berbagai kehidupan sosial, ekonomi dan budaya desa serta memiliki potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen pariwisata (Sendouw, 2014). Pengembangan desa wisata akan berhasil jika semua potensi desa seperti sumber daya manusia dan potensi alam yang dimiliki dapat disinergikan secara maksimal.

Tentunya pengembangan desa wisata harus mendapat dukungan dan pemerintah desa setempat dan masyarakatnya. Pengembangan desa wisata membuka peluang penyerapan tenaga kerja, transaksi perdagangan produk asli daerah juga akan meningkat yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan ekonomi masyarakat desa tersebut. Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang desa yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung (Herdiana, 2019).

Tabel 1.
Kajian Teori Komponen Desa Wisata

No.	Sumber teori	Komponen Desa Wisata
1	Gumelar (2010)	Keunikan, keaslian, sifat khas Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar maupun sarana lainnya.

2	Prasiasa (2011)	Memiliki potensi pariwisata, seni dan budaya khas daerah setempat Lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual. Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih, dan pelakupelaku pariwisata, seni dan budaya. Aksebilitas dan infrastruktur mendukung program desa wisata Terjaminnya keamanan, ketertiban dan kebersihan.
3	Feriani Budiyah (2020)	Partisipasi masyarakat local; Sistem norma setempat; Sistem adat setempat; Budaya setempat.

Sumber: Herdiana, 2019.

Pencanangan setiap desa di Kabupaten Enrekang sebagai desa wisata menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah desa setempat. Penguatan segala potensi yang dimiliki desa adalah sebuah keharusan agar visi desa di Kabupaten Enrekang sebagai desa wisata dapat tercapai.

B. Tujuan Desa Wisata dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip-prinsip pengelolaan antara lain, ialah: (1) memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat, (2) menguntungkan masyarakat setempat, (3) berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat, (4) melibatkan masyarakat setempat, (5) menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan, dan beberapa kriteria yang mendasarinya seperti, (Atmoko, 2014) antara lain:

1. Penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal yang biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik merupakan batu loncatan untuk berkembangnya desa wisata.
2. Mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi tradisional lainnya.
3. Penduduk setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat memperoleh pembagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
4. Mendorong perkembangan kewirausahaan masyarakat setempat.

Sedangkan dalam prinsip perencanaan yang perlu dimasukkan dalam “*prelemenay, planning*” yaitu (1) meskipun berada di wilayah pariwisata tak semua tempat dan zona lingkungan harus menjadi daya tarik wisata dan (2) potensi desa wisata tergantung juga kepada kemauan masyarakat setempat untuk bertindak kreatif, inovatif, dan kooperatif. Tidak semua kegiatan pariwisata yang dilaksanakan di desa adalah benar-benar bersifat desa wisata, oleh karena itu agar dapat menjadi pusat perhatian pengunjung, desa tersebut pada hakikatnya harus memiliki hal yang penting, (Dewi dkk, 2013) antara lain:

1. Keunikan, keaslian, sifat khas.
2. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa.
3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung.
4. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.

Perencanaan pariwisata di wilayah pedesaan bukanlah tugas yang mudah terutama dalam keadaan yang mempunyai lingkungan alam dan budaya yang peka. Tujuan pengembangan kawasan desa wisata adalah:

1. Mengenali jenis wisata yang sesuai dan melengkapi gaya hidup yang disukai penduduk setempat.
2. Memberdayakan masyarakat setempat agar bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkungannya.
3. Mengupayakan agar masyarakat setempat dapat berperan aktif dalam pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungannya, dan agar mereka, mendapat jaminan memperoleh bagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
4. Mendorong kewirausahaan masyarakat setempat.
5. Mengembangkan produk wisata desa.

C. Sasaran Pengembangan Desa Wisata

Dalam pengembangan wisata yang bersentra pada lokalistik desa, maka perlu menetapkan saran sebagai berikut:

1. Tersusunnya pemodelan kawasan desa wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan / ramah lingkungan.
2. Memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya.
3. Terwujudnya penataan desa wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk men-

jaga kelestarian lingkungan dan menjaga keselamatan pengunjung.

4. Terwujudnya kawasan desa wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional.
5. Terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya, masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan bahan mentah yang ada di desa.

D. Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata

Kebudayaan membuat perkampungan dimulai sejak manusia merasa atau terpaksa oleh kebutuhan atas rumah tempat berdiam, kebudayaan perkampungan di mulai sejak manusia mulai menyusun kehidupan masyarakat. Perkampungan masyarakat Massenrempulu memiliki nilai-nilai keunikan, tidak saja karena bentuk fisik kampung yang ditunjang oleh bentuk-bentuk rumah yang berciri khas dan mengandung banyak nilai filosofi dari adat kebiasaan secara khusus (Syafingi dkk, 2020). Selain dari rumah, juga tanah tempat rumah itu dibangun (lahan) menjadi bahan perhatian yang tidak kurang pentingnya. Sebagai contoh bumi menduduki tempat utama dalam pandangan hidup orang Massenrempulu, (Karim, A. 2019).

Pola perkampungan masyarakat Massenrempulu mencerminkan satu kesatuan yang utuh yang satu sama lain ditampilkan melalui formasi dan komposisi rumah, rumah yang berdekatan, dengan memusat (bertitik pusat) kepada satu bangunan milik orang yang diperlakukan di kampung itu, orang itu disebutnya sesepuh. Pola kampung secara keseluruhan terdiri dari rumah-rumah yang berhubungan

dengan berbagai fasilitas yang mencerminkan pola hidup harmonis dalam kesatuan lingkungan, sehingga merupakan perpaduan antara aspek-aspek yang keramat (*sacral*) dan lingkungan yang tetap terpelihara dalam suasana *silih asah*, *silih asih* dan *silih asuh* sebagai satu konsep saling menyayangi di antara keluarga, kerabat dan paling utama adalah cerminan sikap gotong royong masyarakat dalam segala bentuk perilaku dan kehidupan (Hehamahua, 2015). Harmonisasi dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dan lingkungan dalam pola perkampungan yang memiliki kemampuan untuk memberikan penyesuaian dan harmonisasi antara religi dan kemajuan teknologi serta modernisasi.

E. Pendekatan Kawasan Desa Wisata di Bumi Massenrempulu

Pentingnya suatu pendekatan dalam proses pembangunan pemodelan agar dalam upaya pembangunan tetap berorientasi kepada kepentingan masyarakat setempat, lingkungan dan peletakan/pembagian zonasi yang tepat dan penataan. Lanskap yang didasarkan kepada kondisi, potensi alam serta karakter sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan adalah (Karim, 2020) sebagai berikut:

Tabel 2.
Pendekatan Kawasan Desa Wisata di Massenrempulu

No.	Model pendekatan	Metode pendekatan
1	Pendekatan kualitas lingkungan masyarakat	Dasar utama yang senantiasa harus dijaga keutuhannya, sehingga situasi konflik tidak akan timbul bila langkah-langkah pendekatan dengan segala kearifan untuk memenuhi fungsi-fungsi timbal balik, estetika, rekreatif, ilmiah dan konservasi

2	Pendekatan perencanaan fisik	Meliputi daya tampung ruang, pemilihan daya tampung ruang, pemilihan lokasi yang tepat serta peletakan zonasi yang seimbang antara zona inti, zona penyangga, dan zona pelayanan, fisik, tanah, air dan iklim biotis
3	Pendekatan unsur-unsur pariwisata	Dibangun dalam hubungan dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas bagi wisatawan.
4	Pendekatan dasar rencana tapak	Berkaitan dengan peletakan fisik, sistem transportasi, sistem utilitas tipologis, pola penghijauan, pola desain/arsitek-tural, tata bangunan, topografi, iklim, de-sain lanskap.
5	Pendekatan struktural geo-klimatologis dan geo-morfologis	Mendukung kesuburan dan keindahan seperti karakter, pegunungan/perbukitan yang indah, udara yang sejuk serta kondisi hidrologis yang memungkinkan, budi daya pertanian berkembang. Hubungan antara wisatawan dan penduduk setempat dan melindungi masyarakat dari melimpahnya kegiatan pariwisata.

Sumber: Karim, 2020.

Unsur penting berikutnya dalam kawasan desa wisata yang berkelanjutan adalah pelatihan masyarakat dari berbagai tingkat pendidikan, karena jenis pariwisata ini memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam pengelolaannya. Unsur penting lainnya adalah yang erat kaitannya dengan pembentukan kelompok pengusaha setempat, pembinaan kelompok pengusaha lokal dapat membentuk suatu fungsi yang bermanfaat dan sungguh dapat memunculkan usaha-usaha baru, (Antlöv dkk, 2016).

Nilainya dapat diperoleh dengan memajukan/menampilkan produk lokal seperti barang kerajinan makanan khas, minuman dan produk-produk lainnya yang memberikan cita rasa kepada wisata-

wan tentang daerah tersebut dan dapat digunakan untuk mempromosikan kekhasan tersebut kepada wisatawan. Semua itu adalah produk yang dapat dimanfaatkan oleh usaha pariwisata lokal sendiri, dengan demikian memajukan ciri lokal mereka sendiri dan mengembalikan lebih banyak uang ke ekonomi daerah tersebut. Pembentukan kelompok pengusaha lokal juga dapat memperkuat kedudukan pengusaha kecil yang perlu banyak berpegangan tangan agar menjadi kuat dan mapan, (Bebbington, 2006).

Keaslian memberikan manfaat bagi produk wisata, termasuk desa wisata. Keaslian yang utama adalah kualitas, asli, keorsinilan, keunikan, khas daerah dan kebanggaan daerah. Keaslian itu dapat terwujud pula melalui gaya hidup dan kualitas hidup masyarakat dan secara khusus berkaitan dengan perilaku integritas, keramahan dan kesungguhan penduduk yang tinggal dan berkembang menjadi masyarakat daerah tersebut. Keaslian juga dipengaruhi oleh keaslian ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut misalnya warisan budaya, pertanian, bentangan alam, jasa dan yang paling penting adalah peristiwa sejarah dan budaya dari daerah itu.

Dengan demikian dalam proses perencanaan pemodelan desa wisata tidak dapat dipisahkan dari partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat muncul secara partisipatif sebagai alternatif terhadap pendekatan pembangunan serta sentralisasi dan bersifat *bottom up*. Munculnya proses partisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat mendasarkan atas dua perspektif (Effendi, 2013).

Pertama: Pelibatan masyarakat, setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan program yang akan mewarnai kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap, dan pola pikir serta nilai-nilai pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh.

Kedua: membuat umpan balik yang pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terlepas dari kegiatan pembangunan. Masyarakat dapat diajak terlibat guna mengarahkan perencanaan dan program pemodelan desa wisata dalam kerangka pembangunan desa secara keseluruhan yang berintikan ; (1) desa tempat dimana pemerintahan desa menjalankan pemerintahannya, (2) desa tempat dimana penduduk desa menjalankan pola kehidupan dan keagamaannya dan berkumpul dalam satu harmonisasi kehidupan yang mencerminkan tata karma masyarakat, (3) desa tempat dimana masyarakat desa melakukan kegiatan waktu luang dan berekreasi bercengkerama di alam desa yang mereka miliki, (4) desa dimana masyarakat memiliki sikap, perilaku melindungi, memelihara dan memanfaatkan kepemilikan seni budaya, lingkungan, nilai-nilai tradisi yang dapat mendorong kelestarian promosi desa itu sendiri (Rizkianto & Topowijono, 2018). Partisipasi harus bisa mengubah masyarakat dari hanya obyek menjadi subyek pembangunan dan karenanya harus menguntungkan/menyejahterakan masyarakat.

Bilamana wisata desa dikembangkan, maka wisata desa harus memiliki manfaat terhadap:

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Wisata desa perlu dukungan melalui kelancaran dan efektivitas pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar masyarakat desa mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk itu perlu adanya pengembangan usaha ekonomi dan mata pencaharian berkelanjutan yang dapat ditempuh dengan cara: (1) Usaha Ekonomi Rakyat (usaha kecil, mikro dan koperasi) yang memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dan lestari, (2) dikembangkan badan usaha milik rakyat yang dapat berdampingan, kemitraan dengan BUMDes, (3) pengembangan klaster-klaster usaha ekonomi rakyat yang menampilkan

produk-produk unggulan bernilai tambah tinggi sebagai sentra-sentra kemandirian ekonomi rakyat, (Karim, A. 2019).

Dukungan bagi kelancaran dan efektivitas pemberdayaan ekonomi rakyat tersebut di atas dapat dikembangkan secara partisipatif sesuai dengan prioritas masyarakat seperti, prasarana fisik yang memperlancar transportasi dan komunikasi, pelayanan dasar, perluasan ruang publik pada tingkatan masyarakat yang mendukung berbagai lapisan masyarakat, pengembangan tenaga kerja dan lingkungan kerja bagi tenaga kerja usia muda.

2. Pemberdayaan Sosial Budaya

Pendekatan integratif dalam menata kehidupan sosial dapat dikaitkan melalui kearifan lokal yang terdiri dari pemerintah daerah, sebagai regulator dan fasilitator melakukan identifikasi dan kegiatan atas bentuk, mekanisme dalam pemecahan masalah ke pendudukan, perbaikan pelayanan dan peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan pelayanan masyarakat, Unsur-unsur tersebut perlu menjadi pertimbangan utama dalam mengkaji kawasan desa wisata, mengingat pengembangan kepariwisataan secara umum tidak terlepas kaitannya dengan pariwisata sebagai suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat (Purnamasari, 2011).

Disamping itu beberapa pendapat menunjukkan adanya berbagai dampak yang tidak diharapkan, seperti memburuknya kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat, memburuknya ketimpangan antara daerah, hilangnya kontrol masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi. Pentingnya kajian sosiologi terhadap penerapan pemodelan pariwisata semakin jelas, karena tipe pariwisata yang dikembangkan adalah desa wisata, dimana desa wisata mempunyai beberapa ciri,

seperti; desa wisata melibatkan masyarakat lokal secara lebih luas dan lebih intensif karena dasarnya adalah berkaitan dengan kehidupan sosial budaya yang menjadi daya tarik wisata melekat pada masyarakat itu sendiri, oleh karena itu pentingnya mengidentifikasi dampak terhadap sosial budaya pariwisata (Khaliq & Noy, 2007)) terdiri dari enam kategori, yaitu :

1. Dampak terhadap struktur demografi
2. Dampak terhadap bentuk dan tipe mata pencaharian
3. Dampak terhadap transportasi nilai
4. Dampak terhadap gaya hidup tradisional
5. Dampak terhadap pola konsumsi, dan
6. Dampak terhadap pembangunan masyarakat yang merupakan manfaat sosial budaya pariwisata.

3. Pemberdayaan Lingkungan Desa wisata

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menyangkut tiga dimensi penting yaitu, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Dimensi ekonomi antara lain berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan, serta merubah pola produksi dan konsumsi ke arah yang seimbang, sedangkan dimensi sosial bersangkutan dengan upaya pemecahan masalah ke pendudukan perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan pendidikan dan lain-lain. Adapun dimensi lingkungan, diantaranya mengenai upaya pengurangan dan pencegahan terhadap polusi pengelolaan limbah serta konservasi/preservasi sumber daya alam (Nawawi, 2013).

Sedangkan prinsip-prinsip sistemik mencakup keanekaragaman, kemitraan dan partisipasi strategi yang dapat ditempuh dalam perencanaan kawasan desa wisata, antara lain:

- a. Kawasan desa wisata harus berdasarkan prinsip pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan pem-

bangunan bernuansa lingkungan memiliki keterkaitan dengan pencegahan kerusakan sumber daya alam sebagai akibat dari satu perkembangan kepariwisataan dan merupakan dampak baik terhadap lingkungan hidup biogeofisik dan sumber daya alam, sosial ekonomi dan budaya penduduk setempat (Siswantoro dkk, 2012). Karena itu kewaspadaan terhadap dampak lingkungan dalam pemodelan desa wisata yang akan diakibatkan oleh kunjungan wisatawan massal menjadi amat penting guna memelihara kelanjutan kualitas lingkungan hidup/sumber daya alam yang tersedia di pedesaan.

- b. Kawasan desa wisata harus sudah mengantisipasi secara terpadu, kemungkinan terjadinya dampak lingkungan hidup/sumber daya alam sejak dini, yang digarap sejak tahap perencanaan, sehingga upaya untuk mencegah dan meng-arungi serta mengendalikan dampak lingkungan hidup/sumber daya alam sebagai bagian dari pengembangan desa wisata tidak terpisahkan dan dapat dilaksanakan.
- c. Studi pra-rencana untuk mendukung desa wisata dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan tersebut, sekaligus akan memberikan masukan yang berharga akan tersedianya potensi desa wisata.
- d. Pengembangan desa wisata lebih diarahkan dan dipacu guna menuju upaya pengembangan ekowisata yang berpola pada upaya pemanfaatan dan menyelamatkan lingkungan biogeofisik dan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya serta memelihara sumber daya alam pedesaan, dari perusakan lingkungan hidup dan pemborosan sumber daya alam pedesaan.
- e. Dalam rangka pengendalian dampak sosial ekonomi dan budaya, pengembangan kawasan wisata desa harus dituju-

kan kepada upaya meningkatkan pemerataan kesempatan, pendapatan, peran serta dan tanggung jawab masyarakat setempat yang terpadu dengan upaya pemerintah (daerah) dan dunia usaha yang relevan.

- f. Pengembangan kawasan desa wisata tidak dapat dilepaskan dari desa pusat, pemerintah desa, desa tempat masyarakat desa sebagai tempat hidup mereka dan desa tempat berekreasi masyarakat, hal ini penting untuk mencegah beralihnya aset desa dan kepemilikan lahan masyarakat desa kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta tersisihkannya masyarakat oleh berkembangnya pendatang.

Sejalan dengan strategi tersebut di atas maka dalam pengelolaan sumber daya alam pedesaan melalui pelibatan masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di pedesaan adalah mencakup peningkatan efisiensi dan produktivitas, pemerataan hasil dan kesejahteraan secara profesional dan pencapaian sumber daya berkelanjutan, (Nugroho dkk, 2021).

Ke-tiga tujuan ini merupakan tiga pilar yang secara bersama dan seimbang mendukung, keberadaan satu sumber daya alam bagi kepentingan masyarakat di desa.

4. Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pemodelan kelembagaan dan sumber daya manusia pada desa wisata lebih menekankan kepada: *Pertama*; investasi pada modal manusia (*human capital*) yaitu dalam bidang pendidikan dan kesehatan, *Ke-dua*; peningkatan kapasitas organisasi di pedesaan, disamping organisasi pemerintahan desa yang secara bersama-sama memiliki keinginan untuk mengembangkan

desa wisata sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan, ***Ke-tiga***; memperluas dan mengintegrasikan mandat organisasi dan kelompok sehingga efisiensi bisa tercapai, ***Ke-empat***; memperbaiki budaya kerja, kerja keras, tanggung jawab dan hemat, ***Ke-lima***; menghilangkan sifat dan mental negatif, boros, konsumtif yang dapat merusak produktivitas.

Sedangkan melalui pendidikan lebih diarahkan kepada peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam bentuk pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh pasar. Pendidikan pelatihan tidak hanya memberikan keilmuan yang lebih penting adalah kesadaran untuk tumbuhnya sikap menerima, bekerja sama, dan menimbulkan perilaku baru dalam upaya mengentaskan kemiskinan, keterbelakangan dan ketergantungan.

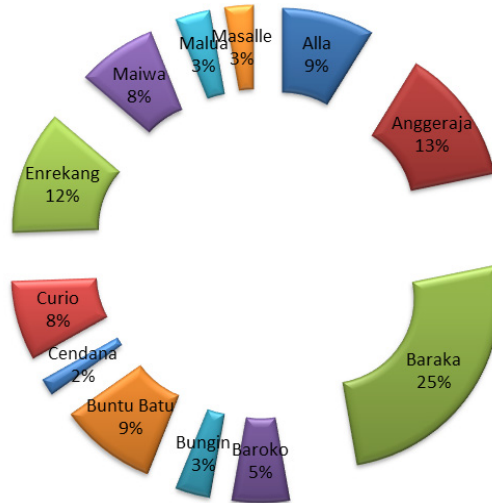
BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Karakteristik Responden

1. Alamat Responden

Berdasarkan pada hasil pengolahan kuisisioner didapatkan karakteristik responden yang memberikan jawaban atas kuisisioner yang telah disebarakan, dimana dalam karakteristik responden ini menanyakan berdasarkan pada isi: alamat, usia, pendidikan, pekerjaan, dan jenis kelamin. Dari data yang dibagikan ditemukan hasil sebagai berikut:

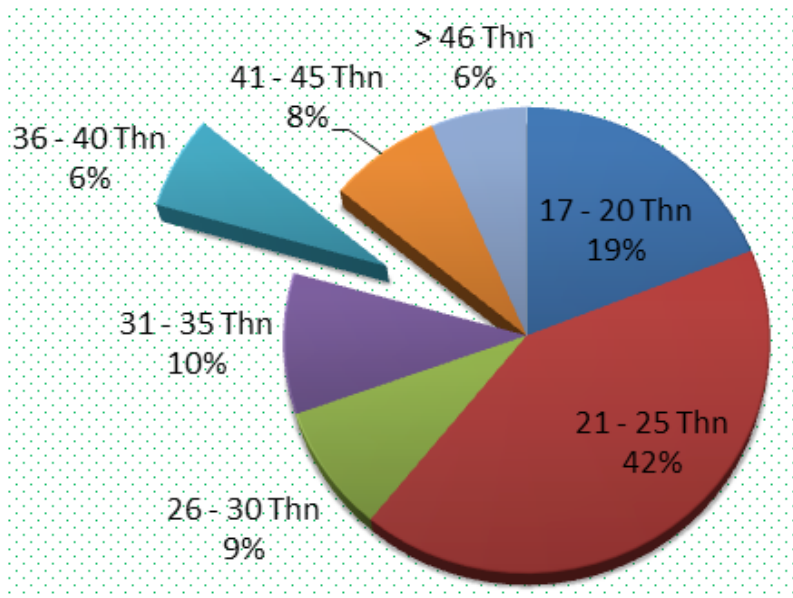


Gambar 1. Alamat Responden

Sumber: Data olahan, 2021.

Berdasarkan alamat responden berdasarkan asal Kecamatan dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang dari 184 orang responden. Maka yang terbanyak dari Kecamatan Baraka, sebanyak 47 orang (25%), Kecamatan Enrekang sebanyak 22 orang (12%), Kecamatan Anggeraja sebanyak 24 orang (13%), Buntu Batu sebanyak 17 orang (9%), Kecamatan Alla sebanyak 16 orang (9%), Kecamatan Maiwa sebanyak 14 orang (8%), Kecamatan Curio 14 orang (8%), Kecamatan Baroko sebanyak 10 orang (5%), Kecamatan Malua sebanyak 6 orang (3%), Kecamatan Bungin sebanyak 6 orang (3%), Kecamatan Masalle sebanyak 5 orang (3%), dan paling sedikit dari Kecamatan Cendana sebanyak 3 orang (2%).

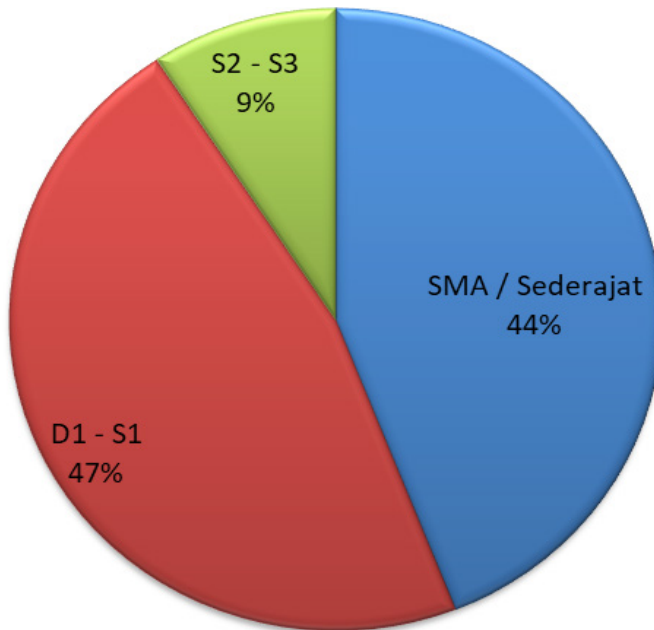
2. Usia Responden



Gambar 2. Usia Responden

Sumber: Data olahan, 2021.

3. Pendidikan Responden



Gambar 3. Pendidikan Responden

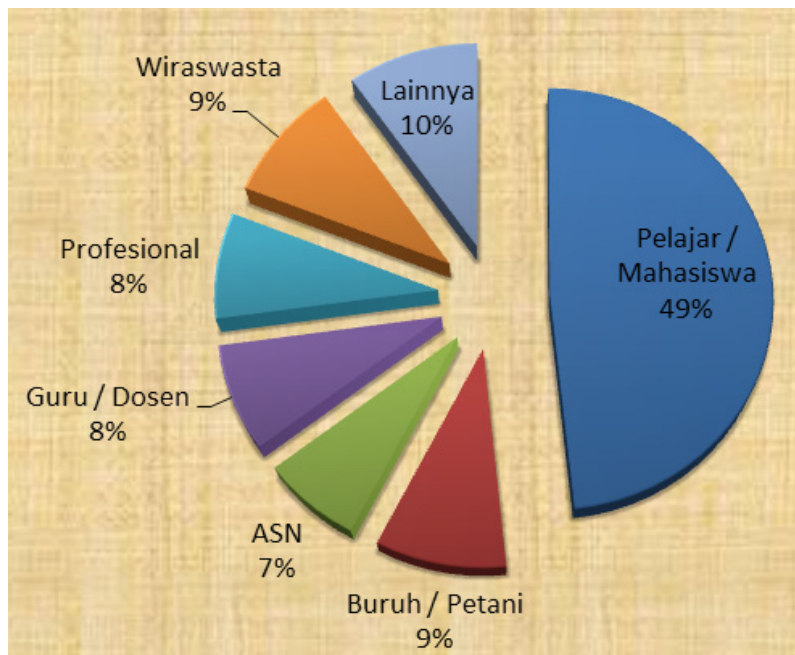
Sumber: Data olahan, 2021.

Berdasarkan jenjang pendidikan berdasarkan dari 184 orang responden. Maka yang terbanyak merupakan responden dengan pendidikan yakni pada jenjang Diploma Satu (D1) – Strata Satu (S1) sebanyak 86 orang (47%). Jenjang pendidikan SMA / sederajat sebanyak 81 orang (44%). Sementara jumlah responden terkecil yakni pada jenjang pendidikan Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) sebanyak 17 orang (9%).

4. Pekerjaan Responden

Berdasarkan pada pekerjaan responden, yakni terbanyak adalah Pelajar / Mahasiswa sebanyak 89 orang (49%). Buruh / Petani sebanyak 17 orang (9%), Wiraswasta sebanyak 17 orang (9%), Guru / Dosen sebanyak 15 orang (8%), Profesio-

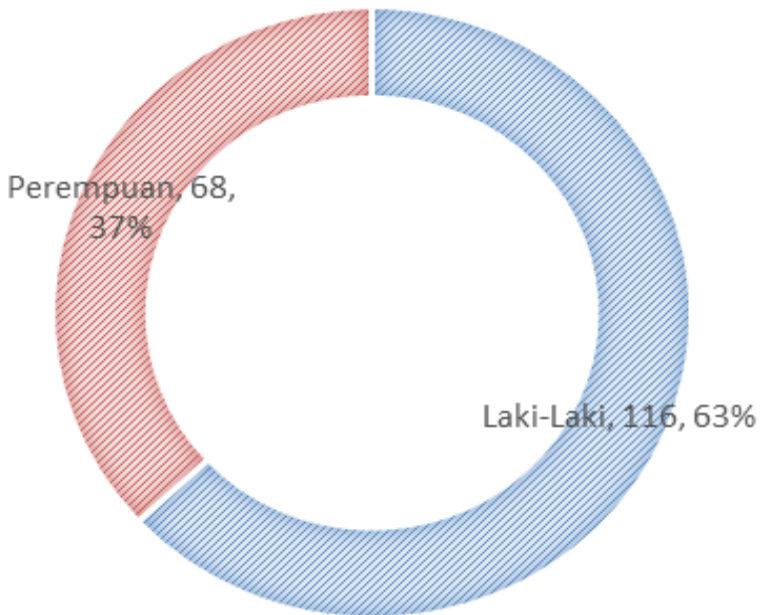
nal sebanyak 15 orang (8%), Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 13 orang (7%), dan lainnya sebanyak 18 orang (10%). Berikut dapat dilihat pada diagram gambar dibawah:



Gambar 4. Pekerjaan Responden

Sumber: Data olahan, 2021.

5. Jenis Kelamin Responden



Gambar 5. Jenis Kelamin Responden

Sumber: Data olahan, 2021.

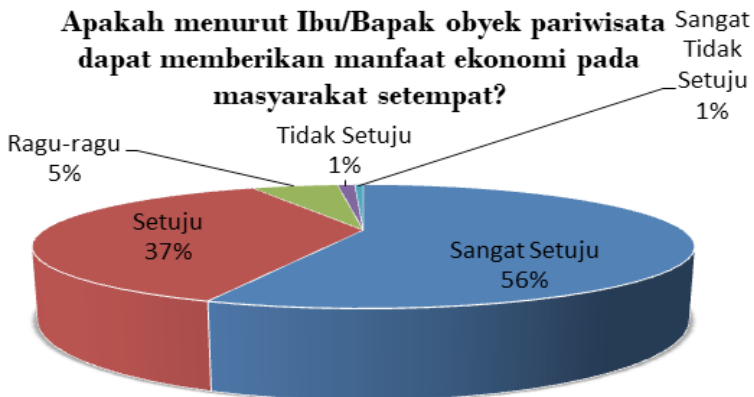
Berdasarkan pada diagram gambar diatas, jumlah reponden jenis kelamin laki-laki sebanyak 116 orang (63%), sementara jenis kelamin perempuan sebanyak 68 orang (37%).

B. Deskriptif Tanggapan Responden

Berdasarkan data ini yang telah diolah, menunjukkan rata-rata (*mean*) dari jawaban responden terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam kuesioner. Dari angket pertanyaan tersebut menggunakan aplikasi *SurveyHeart* dengan data / jawaban sebagai berikut:

1. Hasil tanggapan responden tentang potensi wisata desa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang

- a. Obyek pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat



Gambar 6. Obyek Pariwisata Memberikan Manfaat Ekonomi

Sumber: Data olahan, 2021.

Berdasarkan pada diagram diatas, dari jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan, dari 184 orang responden memberikan jawaban Sangat Setuju sebanyak 103 orang (56%), Setuju sebanyak 68 orang (37%). Responden memberikan jawaban Ragu-Ragu sebanyak 10 orang (5%), Tidak Setuju sebanyak 2 orang (1%), sementara Sangat Tidak Setuju sebanyak 1 orang (1%).

- b. Obyek wisata desa dapat dikembangkan untuk menaikkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat

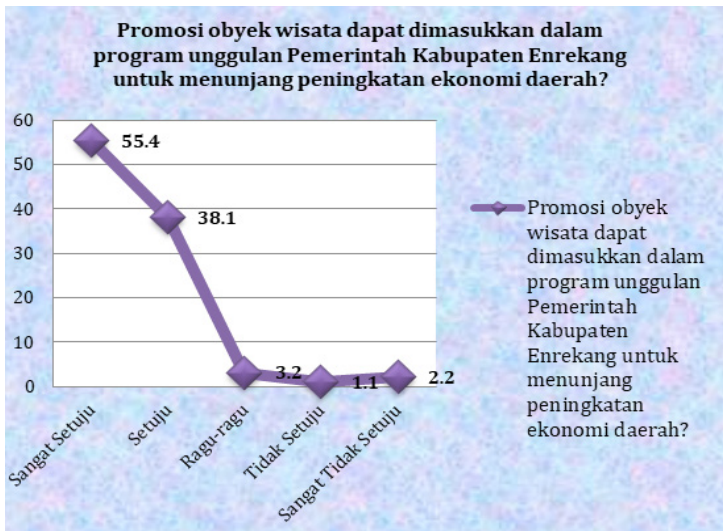


Gambar 7. Obyek Desa Wisata dapat Dikembangkan

Sumber: Data olahan, 2021.

Berdasarkan pada diagram 7 diatas, dari jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan, dari 184 orang responden memberikan jawaban Sangat Setuju sebanyak 90 orang (49%), Setuju sebanyak 77 orang (42%). Responden memberikan jawaban Ragu-Ragu sebanyak 11 orang (6%), Tidak Setuju sebanyak 4 orang (2%), sementara Sangat Tidak Setuju sebanyak 2 orang (1%).

- c. Promosi obyek wisata dapat dimasukkan dalam program unggulan Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah



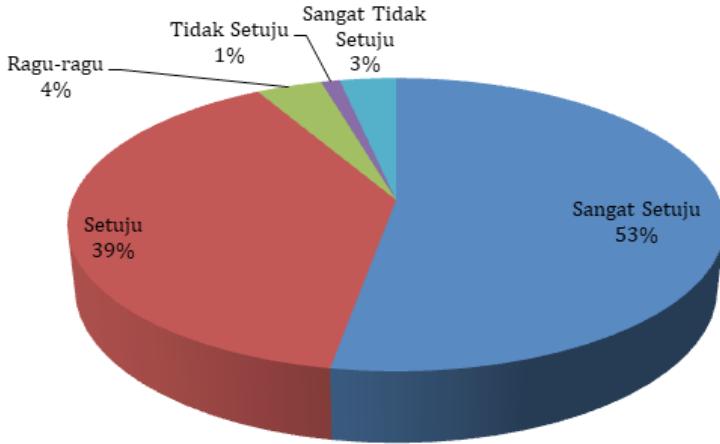
Gambar 8. Promosi Wisata sebagai Program Unggulan Daerah

Sumber: Data olahan, 2021.

Berdasarkan pada diagram tersebut, dari jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan, dari 184 orang responden memberikan jawaban Sangat Setuju sebanyak 120 orang (55,4%), Setuju sebanyak 70 orang (38.1%). Responden memberikan jawaban Ragu-Ragu sebanyak 6 orang (3.2%), Tidak Setuju sebanyak 2 orang (1.1%), sementara Sangat Tidak Setuju sebanyak 4 orang (2.2%).

- d. Obyek wisata pada desa dikelola sendiri oleh masyarakat desa tersebut dan tetap mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten atau lembaga yang kredibel

Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak jika obyek wisata pada Desa dikelola sendiri oleh masyarakat Desa tersebut dan tetap mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten atau Lembaga yang kredibel?

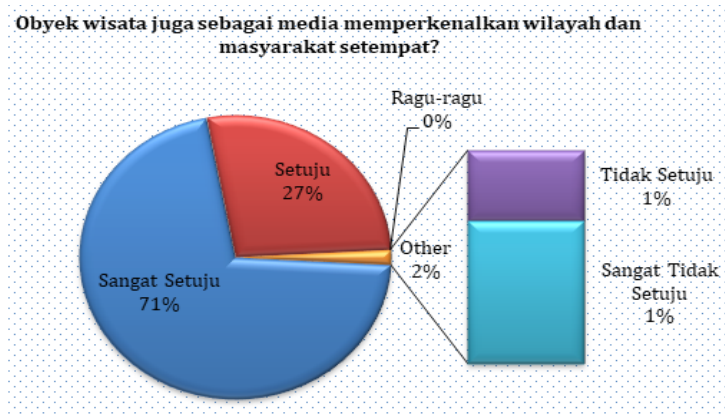


Gambar 9. Obyek Wisata dapat Dikelola Sendiri oleh Masyarakat Desa

Sumber: Data olahan, 2021.

Berdasarkan pada diagram tersebut, dari jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan, dari 184 orang responden memberikan jawaban Sangat Setuju sebanyak 97 orang (53%), Setuju sebanyak 72 orang (39%). Responden memberikan jawaban Ragu-Ragu sebanyak 7 orang (4%), Tidak Setuju sebanyak 2 orang (1%), sementara Sangat Tidak Setuju sebanyak 6 orang (3%).

- e. Obyek wisata juga sebagai media memperkenalkan wilayah dan masyarakat setempat.



Gambar 10. Obyek Wisata sebagai Media Sosialisasi

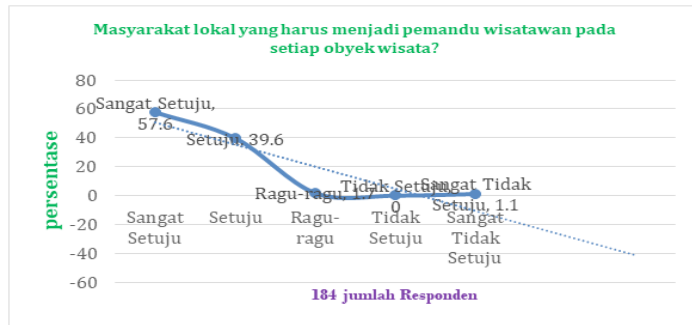
Sumber: Data olahan, 2021.

Berdasarkan pada diagram 10 diatas, dari jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan, dari 184 orang responden memberikan jawaban Sangat Setuju sebanyak 131 orang (71%), Setuju sebanyak 50 orang (27%). Responden memberikan jawaban Ragu-Ragu sebanyak 0 orang (0%), Tidak Setuju sebanyak 1 orang (1%), sementara Sangat Tidak Setuju sebanyak 2 orang (1%).

- f. Masyarakat lokal yang harus menjadi pemandu pada setiap obyek wisata

Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan, dari 184 orang responden memberikan jawaban Sangat Setuju sebanyak 105 orang (57.6%), Setuju sebanyak 73 orang (39.6%). Responden memberikan jawaban Ragu-Ragu sebanyak 3 orang (1.7%),

Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), sementara Sangat Tidak Setuju sebanyak 2 orang (1.1%). Berikut kurva diagram jawaban dari responden:



Gambar 11. Masyarakat Lokal Menjadi Pemandu Wisata pada Desanya

Sumber: Data olahan, 2021.

- g. Lokasi obyek wisata pada setiap wilayah yang potensial untuk dikembangkan berdasarkan jawaban responden

Berikut daftar destinasi potensi desa wisata yang disebutkan oleh responden:

Tabel 3.
Daftar Destinasi Desa Wisata di Kabupaten Enrekang

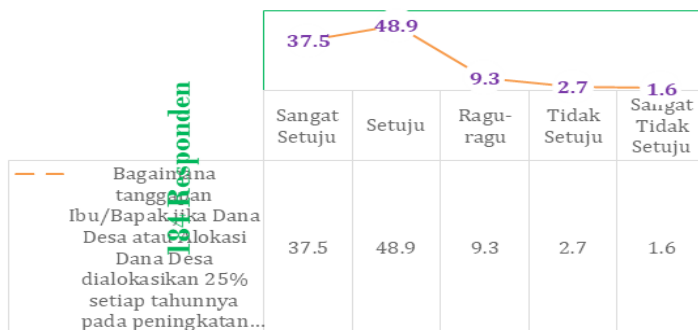
No	Nama Obyek Potensial	Lokasi
1	Persawahan Pulu' Mandoti	Desa Salukanan
2	Pekebunan Kopi	Desa pemandungan
3	Air terjun Anoan	Desa Salukanan
4	Dante Pine	Kelurahan Mendatte
5	Hutan Pinus Baredok	Desa Buntu Mondong
6	Lo'ko Bubau	Desa Kadingeh
7	Cekong	Kelurahan Mendatte
8	Arum Jeram Sungai Saddang	Enrekang

9	Buntu Kiki	Desa Curio
10	Dangke	Cendana
11	Buntu Tembo'	Desa Salukanan
12	Benteng Alla	Baroko
13	Buntu Cinta	Desa Pandung Batu
14	Buntu Kuri-Kuri	Desa Pandung Batu
15	Gunung Latimojong	Desa Latimojong
16	Mendatte Park	Kelurahan Mendatte
17	Air terjun katangka	Desa Langda
18	Gunung Nona	Anggeraja
19	Arum Jeram Liku Kande Api	Buntu Batu
20	Gunung Bamba Puang	Anggeraja
21	Lo'ko Malillin	Belajen Alla
22	Persawahan Desa	Desa Bungin
23	Permandian Matua / Water Park	Alla
24	Buntu Macca	Anggeraja
25	Pemnadangan Kota Enrekang	Enrekang
26	Tebing Mandu	Tontonan
27	Air terjun lagandang	Buntu Batu
28	Perkebunan Kopi	Desa Kendenan
29	Lo'ko Tojolo	To'cemba Alla
30	Wisata kuliner	Buntu Mondong
31	Air terjun salassang	Curio
32	Buntu parasuk	Malua
33	Buntu Tongko	Desa Tongko
34	Lewaja	Enrekang
35	Buntu Soma Sipate	Desa Singki
36	Air Terjun Bone-Boone	Desa Bone-Bone
37	Buntu soma sipate Villa sipate	Anggeraja
38	Buttu Sumbang	Desa Sumbang
39	Buntu Tallu	Bunu Desa Mampu
40	Air Tejun La'buran	Desa Singki
41	Air Terjun To'kuang	Desa Masalle
42	Goa Lo'ko Jarun	Desa Mampu

43	Kebun Raya Massenrempulu	Desa Karrang
44	Gunung Tiro Padang	Desa Tobalu
45	Goa Tappaan	Jl. Langsagaga Enrekang
46	Buntu Lintik	Desa Pepandangan
47	Permandian Maballo	Enrekang
48	Buntu Simbolong	Masalle
49	Situs sejarah	Desa Banti
50	Agroindustry	Anggeraja
51	Buntu Alla	Alla
52	Air terjun bululangi	Masalle
53	Arum jeram kande api	Bungin
54	Buntu Rawinta	Anggeraja
55	Wisata adat	Kaluppini
56	Wisata adat Arung Maiwa	Tapong
57	Kebun Durian	Maiwa
58	Cekdam Dusun Jambu	Desa Patondon Salu
59	Air Terjun Tattungo	Desa Puncak Harapan
60	Air terjun pelali	Desa Buntu Pema
61	Villa Saud Group	Maroangin Maiwa
62	Air Terjun Sitodon	Curio
63	Lo'ko wai	Curio
64	Buttu	Temban
65	Lo'ko pamatung	Buntu Dea Baroko
66	Buntu Macca	Kotu
67	Air Terjun Sarassang	Desa Kaluppang

Sumber: Data olahan, 2021.

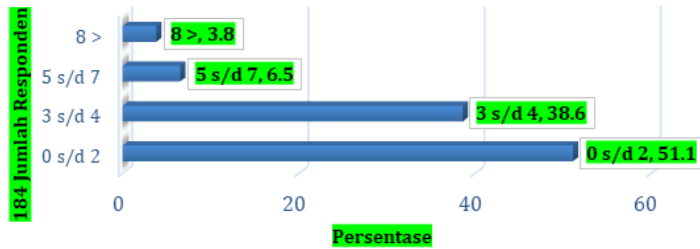
Dana Desa atau Alokasi Dana Desa dialokasikan 25% setiap tahun dalam peningkatan obyek wisata pada setiap desa yang potensial untuk dikembangkan



Gambar 12. Dana Desa atau ADD Dialokasikan 25% pada Peningkatan Obyek Wisata
Sumber: Data olahan, 2021.

Berdasarkan pada kurva diagram diatas, dari jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan, dari 184 orang responden memberikan jawaban Sangat Setuju sebanyak 69 orang (37.5%), Setuju sebanyak 90 orang (48.9%). Responden memberikan jawaban Ragu-Ragu sebanyak 17 orang (9.3%), Tidak Setuju sebanyak 5 orang (2.7%), sementara Sangat Tidak Setuju sebanyak 3 orang (1.6%).

- h. Jumlah obyek wisata yang dapat dikembangkan pada desa atau wilayah berdasarkan jawaban responden



Gambar 13. Jumlah Obyek Desa Wisata dapat Dikembangkan Setiap Desa

Sumber: Data olahan, 2021.

Berdasarkan pada jawaban responden terhadap jumlah potensi wisata yang dapat dikembangkan pada wilayah / desa. 184 orang responden memberikan jawaban sebagai berikut. 0 – 2 obyek wisata sebanyak 94 orang (51.1%), 3 – 4 obyek wisata sebanyak 71 orang (38.6%). Responden yang memberikan jawaban jumlah 5 – 7 obyek wisata sebanyak 12 orang (6.5%), dan yang memberikan jawaban obyek potensi wisata > 8 sebanyak 7 orang (3.8%).

Berikut tabulasi hasil jawaban responden tentang potensi wisata desa menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang, sebagai berikut:

Tabel 4.

Tabulasi Hasil Tanggapan Responden Tentang Potensi Desa Wisata Menunjang Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Enrekang

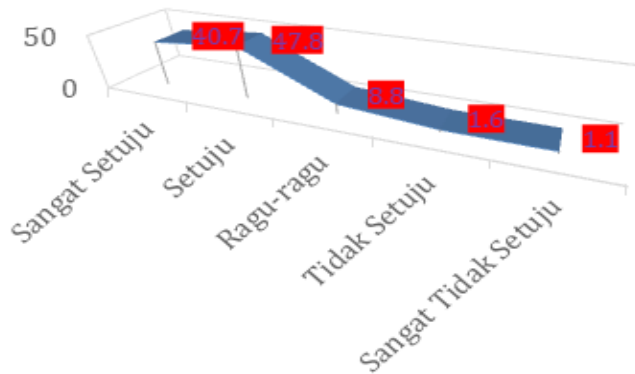
No	Indikator Pertanyaan	Tanggapan Responden									
		Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
		a		b		c		d		e	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Apakah menurut Ibu/Bapak obyek pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat setempat?	103	56.0	68	37.0	10	5.0	2	1.0	1	1.0
2	Apakah obyek wisata di Desa Ibu/Bapak dapat dikembangkan untuk menaikkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat?	90	49.0	77	42.0	11	6.0	4	2.0	2	1.0
3	Promosi obyek wisata dapat dimasukkan dalam program unggulan Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah?	102	55.4	70	38.1	6	3.2	2	1.1	4	2.2

4	<p>Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak jika obyek wisata pada desa dikelola sendiri oleh masyarakat desa tersebut dan tetap mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten atau Lembaga yang kredibel?</p>	97	53.0	72	39.0	7	4.0	2	1.0	6	3.0
5	<p>Obyek wisata juga sebagai media memperkenalkan wilayah dan masyarakat setempat?</p>	131	71.0	50	27.0	0	0	1	0.9	2	1.1
6	<p>Masyarakat lokal yang harus menjadi pemandu wisatawan pada setiap obyek wisata?</p>	106	57.6	73	39.6	3	1.7	0	0.0	2	1.1
7	<p>Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak jika Dana Desa dialokasikan 25% setiap tahunnya pada peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata pada setiap desa yang potensial untuk dikembangkan?</p>	69	37.5	90	48.9	17	9.3	5	2.7	3	1.6

Sumber: Data olahan, 2021.

2. Hasil tanggapan responden tentang peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat desa

- a. Obyek wisata menambah penghasilan / pendapatan masyarakat sekitar



Gambar 14. Obyek Wisata Menambah Penghasilan Masyarakat

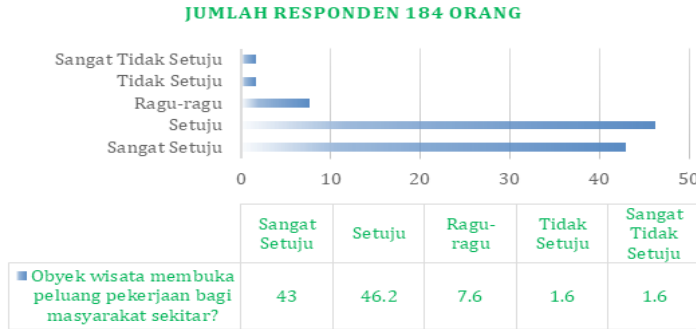
Sumber: Data olahan, 2021.

Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan tersebut, dari 184 orang responden memberikan jawaban Sangat Setuju sebanyak 75 orang (40.7%), Setuju sebanyak 88 orang (47.8%). Responden memberikan jawaban Ragu-Ragu sebanyak 16 orang (8.8%), Tidak Setuju sebanyak 3 orang (1.6%), sementara Sangat Tidak Setuju sebanyak 2 orang (1.1%).

- b. Obyek wisata membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar

Jawaban responden atas pertanyaan tersebut, dari 184 orang responden memberikan jawaban Sangat Setuju sebanyak 79 orang (43%), Setuju sebanyak 85 orang

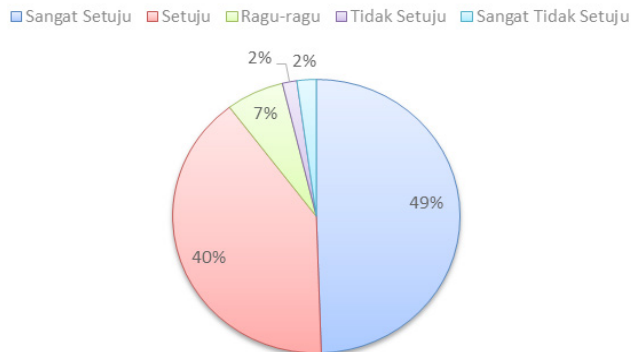
(46.2%). Responden memberikan jawaban Ragu-Ragu sebanyak 14 orang (7.6%), Tidak Setuju sebanyak 3 orang (1.6%), sementara Sangat Tidak Setuju sebanyak 3 orang (1.6%). Berikut kurva diagram 15 atas jawaban responden:



Gambar 15. Obyek Wisata Membuka Peluang Pekerjaan

Sumber: Data olahan, 2021.

- c. Obyek wisata dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Enrekang

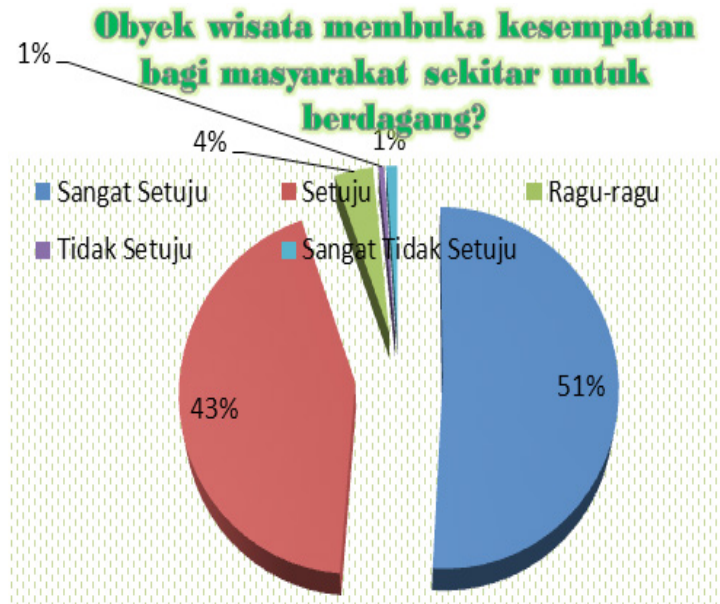


Gambar 16. Obyek Wisata dalam Peningkatan PAD

Sumber: Data olahan, 2021.

Didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan tersebut diatas, dari 184 orang responden memberikan jawaban Sangat Setuju sebanyak 91 orang (49%), Setuju sebanyak 74 orang (40%). Responden yang memberikan jawaban Ragu-Ragu sebanyak 12 orang (7%), Tidak Setuju sebanyak 3 orang (2%), sementara Sangat Tidak Setuju sebanyak 4 orang (2%).

- d. Obyek wisata membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk berdagang



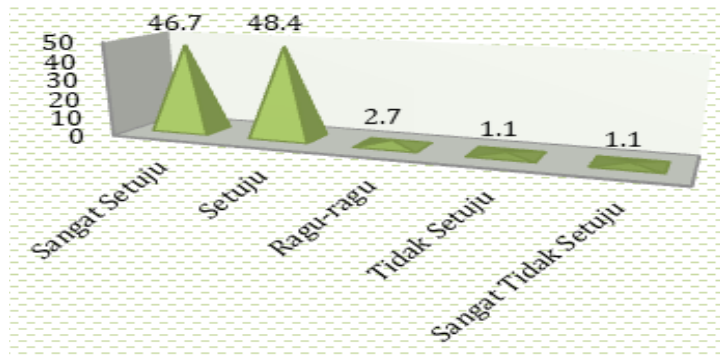
Gambar 17. Obyek Wisata Membuka Peluang untuk Berdagang

Sumber: Data diolah, 2021.

Disesuaikan pada jawaban responden atas pertanyaan tersebut diatas seperti pada gambar 17. Dari 184 orang responden memberikan jawaban Sangat Setuju sebanyak 94 orang (51%), Setuju sebanyak 80 orang

(43%). Responden yang memberikan jawaban Ragu-Ragu sebanyak 7 orang (4%), Tidak Setuju sebanyak 1 orang (1%), sementara Sangat Tidak Setuju sebanyak 2 orang (1%).

- e. Obyek wisata menciptakan lapangan kerja dalam pembuatan souvenir atau cendera mata



Gambar 18. Obyek Wisata Menciptakan Peluang Usaha

Sumber: Data olahan, 2021.

Disesuaikan pada jawaban responden atas pertanyaan tersebut diatas seperti pada gambar 18. Dari 184 orang responden memberikan jawaban Sangat Setuju sebanyak 86 orang (46.7%), Setuju sebanyak 89 orang (48.4%). Responden yang memberikan jawaban Ragu-Ragu sebanyak 5 orang (2.7%), Tidak Setuju sebanyak 2 orang (1.1%), sementara Sangat Tidak Setuju sebanyak 2 orang (1.1%).

- f. Obyek wisata dapat menggerakkan ekonomi berbasis *local wisdom*

Merujuk pada jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan dapat lihat pada gambar 19 dibawah. Dari 184 orang responden memberikan jawaban Sangat

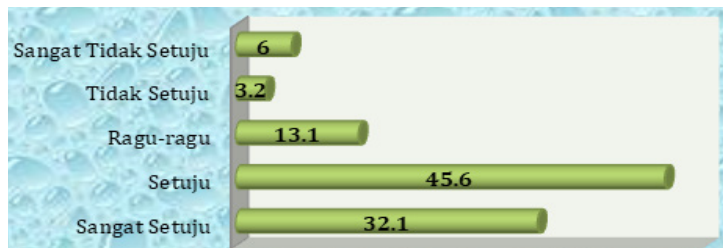
Setuju sebanyak 81 orang (44.1%), Setuju sebanyak 91 orang (49.5%). Responden yang memberikan jawaban Ragu-Ragu sebanyak 8 orang (4.3%), Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), sementara Sangat Tidak Setuju sebanyak 4 orang (2.1%).



Gambar 19. Obyek Wisata Penggerak Ekonomi Desa

Sumber: Data olahan, 2021.

- g. Obyek wisata dapat menarik investor untuk membangun hotel/penginapan dan rumah makan

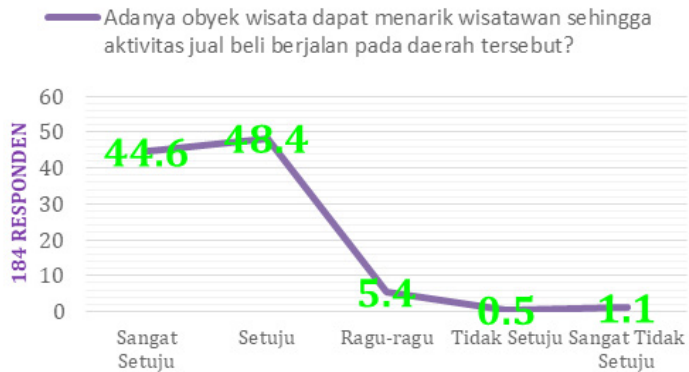


Gambar 20. Obyek Wisata dapat Menarik Investor untuk Berinvestasi

Sumber: Data olahan, 2021.

Berdasarkan pada gambar tersebut diatas, dari 184 orang responden memberikan jawaban Sangat Setuju sebanyak 59 orang (32.1%), Setuju sebanyak 84 orang (45.6%). Responden yang memberikan jawaban Ragu-Ragu sebanyak 24 orang (13.1%), Tidak Setuju sebanyak 6 orang (3.2%), sementara Sangat Tidak Setuju sebanyak 11 orang (11.0%).

- h. Obyek wisata dapat menarik wisatawan, sehingga aktivitas jual beli berjalan pada daerah / lokasi tersebut



Gambar 21. Obyek Desa Wisata dapat Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Sumber: Data olahan, 2021.

Berdasarkan pada gambar 21 diatas, dari 184 orang responden memberikan jawaban Sangat Setuju sebanyak 82 orang (44.6%), Setuju sebanyak 89 orang (48.4%). Responden yang memberikan jawaban Ragu-Ragu sebanyak 10 orang (5.4%), Tidak Setuju sebanyak 1 orang (0.5%), sementara Sangat Tidak Setuju sebanyak 2 orang (1.1%).

i. Obyek wisata dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Hasil jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan dapat lihat pada gambar 22 dibawah. Dari 184 orang responden memberikan jawaban Sangat Setuju sebanyak 88 orang (47.8%), Setuju sebanyak 78 orang (42.4%). Responden yang memberikan jawaban Ragu-Ragu sebanyak 13 orang (7.1%), Tidak Setuju sebanyak 2 orang (1.1%), sementara Sangat Tidak Setuju sebanyak 3 orang (1.6%).

Berikut tabulasi hasil jawaban responden tentang potensi pendapatan ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata, sebagai berikut:

Tabel 5.
Tabulasi Hasil Tanggapan Responden Tentang Potensi Pendapatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pariwisata

No	Indikator Pertanyaan	Tanggapan Responden									
		Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
		a		b		c		d		e	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Obyek wisata menambah penghasilan / pendapatan masyarakat sekitar?	75	40.7	88	47.8	16	8.8	3	1.6	2	1.1
2	Obyek wisata membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar?	79	43.0	85	46.2	14	7.6	3	1.6	3	1.6

3	Obyek wisata dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang?	91	49.0	74	40.0	12	7.0	3	2.0	4	2.0
4	Obyek wisata membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk berdagang?	94	51.0	80	43.0	7	4.0	1	1.0	2	1.1
5	Adanya obyek wisata menciptakan lapangan kerja dalam pembuatan souvenir atau cendera mata?	86	46.7	89	48.4	5	2.7	2	1.1	2	1.1
6	Adanya obyek wisata dapat menggerakkan ekonomi berbasis lokal?	81	44.1	91	49.5	8	4.3	0	0.0	4	2.1
7	Adanya obyek wisata dapat menarik investor untuk membangun hotel/penginapan dan rumah makan?	59	32.1	84	45.6	24	13.1	6	3.2	11	6.0
8	Adanya obyek wisata dapat menarik wisatawan, sehingga aktivitas jual beli berjalan pada daerah / lokasi tersebut?	82	44.6	89	48.4	10	5.4	1	0.5	2	1.1

9	Obyek wisata dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)?	88	47.8	78	42.4	13	7.1	2	1.1	3	1.6
---	---	----	------	----	------	----	-----	---	-----	---	-----

Sumber: Data olahan, 2021.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata dalam peningkatan pendapatan masyarakat desa di Kabupaten Enrekang, merupakan langkah sangat efektif selama masa Pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi merupakan hal terpenting dalam mengimplementasikan setiap kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah. Konsepsi Nasional tentang Peningkatan Ekonomi Nasional, dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Merupakan suatu canangan konsep yang sangat akademis berdasarkan melalui pemetaan potensi wisata setiap desa.

Desa Wisata merupakan kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian dan kearifan lokal (*local wisdom*), baik dari dimensi kehidupan sosial ekonomi, budaya, adat istiadat, keseharian dan lain sebagainya yang mampu dikembangkan sebagai objek pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut, maka wisata desa memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata karena unik dan khas, yang dikelola secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya berdasarkan nilai-nilai *culture* masyarakat setiap desa.

Jika dikaitkan dengan desa sebagai daerah pengembangan wisata, maka pengembangan desa wisata dapat diartikan sebagai proses menjadikan desa sebagai objek wisata, dimana desa meliputi

sumber daya alam, masyarakat, budaya dan segala potensi yang ada di dalamnya yang berkaitan satu dengan yang lainnya (Trianggono dkk, 2018). Sehingga, pengembangan desa wisata secara partisipatif menjadi mutlak untuk dilakukan, mengingat elemen yang ada di desa banyak dan kesemuanya itu saling terkait satu dengan yang lainnya.

Adapun alasan lain mengapa desa wisata perlu dikembangkan dengan pendekatan partisipatif masyarakat, yakni:

Tabel 6.
Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata

No	Orientasi	Model Partisipatif
1	Masyarakat desa	Sasaran utama dari pembangunan desa, sehingga segala aktivitas yang terdapat didalamnya wilayah pedesaan harus diorientasikan dan ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2	Peran masyarakat	Masyarakat merupakan bagian integral dari desa itu sendiri, sehingga tidak memungkinkan adanya kebijakan pembangunan desa, termasuk di dalamnya pengembangan pariwisata tanpa adanya pelibatan masyarakat.
3	Status masyarakat	Masyarakat merupakan kelompok kepemilikan sejarah desa, sehingga masyarakat jauh lebih mengetahui kelemahan dan potensi yang dimiliki desa dibanding dengan pihak luar. Proses pengembangan desa wisata merupakan kontribusi pengalaman dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan desa wisata secara berkala.

Sumber: Data Primer, 2021.

Dari pemahaman tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa masyarakat menjadi sentral dalam pengembangan pariwisata berbasis

masyarakat, keberhasilan dari pengembangan desa wisata berbasis masyarakat terletak kepada sejauhmana masyarakat terlibat dan berkontribusi dalam proses pengembangan wisata yang telah dilaksanakan.

Suatu desa dalam prosesnya pengembangannya menjadi desa wisata memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah desa, masyarakat maupun pihak swasta yang dalam hal ini penanam modal harus bersinergi satu sama lain. Ketiga pihak tersebut harus memiliki persamaan preferensi mengenai pengembangan potensi yang dimiliki desa. Pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan pada tingkat desa, tidak hanya harus mampu mensinergikan berbagai kebijakan pembangunan dengan pengembangan wisata yang ada, tetapi juga harus mampu mengakomodasi pengembangan desa wisata.

Proses transisi suatu desa menjadi desa wisata pada praktiknya tidak terjadi secara begitu saja, melainkan didasarkan kepada beberapa alasan yang mendasarinya. Beberapa alasan yang mendorong pengembangan desa wisata, yaitu:

1. Bagian dari pelestarian nilai tradisi/ budaya.
2. Bagian dari pengembangan potensi baik itu sumber daya alam, nilai budaya maupun sumber daya manusiawi.
3. Kebijakan untuk membuka lapangan pekerjaan.
4. Mendorong akselerasi pembangunan desa.
5. Adanya dorongan eksternal, seperti tingginya minat masyarakat untuk melihat keunikan objek wisata yang ada di desa yang bersangkutan.

Setelah terjadinya proses pengembangan desa menjadi desa wisata, maka dapat memberikan banyak perubahan kepada desa tersebut dan menjadikan pembeda antara desa wisata dengan desa lainnya, adapun perbedaannya dapat dirinci dalam tabel 7 berikut:

Tabel 7.
Perbedaan Desa Non-Wisata dengan Desa Wisata

Aspek	Desa Non-Wisata	Desa Wisata
Potensi	Tidak memiliki kekhasan yang menonjol baik budaya, adat istiadat, karakteristik masyarakat, maupun belum dioptimalkannya potensi desa yang ada yang akan menarik minat wisatawan.	Memiliki kekhasan yang menjadi daya tarik wisatawan baik itu berupa potensi keindahan alam, adat istiadat maupun karakteristik dari masyarakatnya.
Karakter masyarakat	Tertutup kepada warga pendatang/wisatawan.	Terbuka kepada warga pendatang/wisatawan.
Persepsi masyarakat terhadap pariwisata	Memandang dan besikap bahwa pariwisata bukan sebagai sektor yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan mampu meningkatkan pembangunan desa.	Mendukung dan mendorong kegiatan pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan mampu meningkatkan pembangunan desa.
Mata pencaharian	Homogen/Bergantung kepada pengelolaan sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan dan sebagainya.	Heterogen, tidak hanya kepada pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga kepada mata pencaharian lainnya, seperti sektor jasa (<i>contoh: penginapan, transportasi/travel wisata</i>).

Orientasi pembangunan desa	Pariwisata bukan menjadi bagian rencana pembangunan desa, sehingga program pembangunan yang ada tidak ditujukan untuk mendukung kegiatan pengembangan pariwisata.	Pariwisata sebagai bagian dari rencana pembangunan desa, sehingga program pembangunan seperti infrastruktur ditunjukkan untuk mendukung pengembangan pariwisata.
----------------------------	---	--

Sumber: Data Primer, 2021.

Pengembangan desa wisata juga telah merubah arah pembangunan desa yang tadinya kepada pengelolaan sumber daya alam seperti pertanian dan perkebunan, berubah menjadi pembangunan desa berbasis jasa wisata. Perubahan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dimana tidak hanya adanya interaksi individu dengan latar belakang yang berbeda yang melahirkan perubahan sosial, tetapi juga adanya perubahan arah kebijakan pembangunan, ekonomi dan dinamika politik pada akhirnya turut menentukan perubahan sosial di desa. Perubahan tersebut dapat melibatkan semua faktor seperti faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya.

B. Tipologi dan Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal

Desa wisata merupakan tipologi tersendiri dimana desa dibagi ke dalam karakter-karakter berdasarkan potensi dan pola pengembangan pariwisata. Berdasarkan tipologi desa wisata yang ada di Kabupaten Enrekang, maka setidaknya tipologi desa wisata dapat diklasifikasikan, yakni:

1. Desa wisata adat atau budaya dimana dasar potensi dan pengembangan pariwisata berupa budaya atau adat istiadat.

Bentuk adat atau budaya yang dikembangkan bisa berupa sistem kepercayaan (religi), sistem kesenian, sistem sosial, arsitektur tradisional maupun lainnya yang memiliki hubungan dengan budaya dan adat istiadat.

- Desa wisata bersifat ekonomi kreatif, dimana dasar potensi dan pengembangan pariwisata berupa pengembangan ekonomi berbasis kreatifitas masyarakat lokal. Masyarakat memproduksi berbagai produk yang menjadi minat wisatawan seperti kerajinan tangan dengan ciri atau khas lokal desa yang bersangkutan.

Prakteknya klasifikasi desa wisata tidak hanya memberikan perbedaan dari potensi dan pengembangan pariwisata saja, tetapi juga memiliki berbagai perbedaan antara satu dengan yang lainnya dalam banyak aspek seperti yang bisa dijelaskan dalam tabel 8.

Tabel 8.
Perbedaan Klasifikasi Desa Wisata

Aspek	Desa wisata Adat/Budaya	Desa Wisata Alam/Konservasi Alam	Desa Wisata Ekonomi Kreatif
Daya tarik	Nilai adat istiadat, budaya, atau tradisi masyarakat.	Keindahan alam, pegunungan, persawahan dan perkebunan.	Produk-produk kerajinan/ produk ekonomi kreatif masyarakat.
Tujuan pengembangan wisata	Pelestarian adat istiadat, budaya, atau tradisi masyarakat.	Konservasi alam atau lingkungan	Pengembangan ekonomi masyarakat.
Sumber wisata	Menyatu dengan lingkungan masyarakat setempat	Menyatu atau terpisah dengan lingkungan masyarakat.	Menyatu atau terpisah dengan lingkungan masyarakat.

Tujuan wisatawan	Mengetahui dan memahami adat istiadat, budaya, atau tradisi masyarakat.	Menikmati keindahan alam, pegunungan, persawahan, perkebunan.	Memiliki prudukpruduk kerajinan/ produk ekonomi kreatif masyarakat.
Proses interaksi dengan masyarakat lokal	Interaksi masyarakat lokal menjadi bagian integral dalam wisata.	Interaksi masyarakat lokal menjadi bagian eksternal dalam wisata	Interaksi masyarakat lokal bisa menjadi bagian internal atau eksternal dalam wisata.

Sumber: Data primer, 2021.

Pada dasarnya adanya karakter yang berbeda-beda antara satu desa wisata dengan desa wisata lainnya tidak hanya mampu mengembangkan desa berdasarkan kepada potensi dan karakternya masing-masing. Akan tetapi juga dapat memberikan diversifikasi objek wisata bagi wisatawan, sehingga terdapat berbagai alternatif objek wisata yang bisa menjadi pilihan sesuai dengan minatnya masing-masing (Syahrudin, 2020). Klasifikasi desa wisata dalam prakteknya juga tidak memiliki batas secara tegas, dalam artian terdapat beberapa desa wisata yang menggabungkan potensi yang ada semisal desa wisata alam dimana masyarakatnya turut membuat kerajinan sebagai cendera mata khas desanya. Meskipun demikian, ada potensi utama yang dikembangkan sebagai daya tarik pariwisata dan menjadi ciri khas dari desa yang bersangkutan.

Bentuk peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata, setidaknya dapat dibagi ke dalam 3 (tiga), yaitu: Pertama, peran masyarakat sebagai pemrakarsa yang mana masyarakat menjadi pihak pertama yang menemukan dan menggali potensi pariwisata. Kedua, peran masyarakat sebagai pelaksana yang mana masyarakat menjadi pihak yang menginisiasi pelaksanaan dan pengembangan pariwisata sampai dengan terwujudnya objek wisata. Berikut urain

peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata tergambar dalam tabel 10 berikut.

Tabel 9.
Uraian Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata

Peran Masyarakat	Kontribusi	Tindakan Masyarakat	Tujuan Keterlibatan masyarakat
Pemrakarsa	Pemikiran, tenaga, dana dan lain.	Terlibat aktif dalam pengembangan potensi wisata untuk dijadikan objek wisata.	Menggali potensi pariwisata yang ada dan menerima manfaat dari pengembangan pariwisata
Pelaksana	Pemikiran, tenaga, dana dan lain.	Aktif dalam pengembangan desa wisata.	Mengembangkan potensi pariwisata yang ada dan menerima manfaat dari pengembangan pariwisata.
Penyerta	Berpartisipasi dengan peran berdasarkan standar kemampuan yang dimiliki.	Aktif dalam pengembangan desa wisata.	Pengembangan potensi desa wisata yang dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat lokal.
Pemantau	Memonitoring seluruh aktivitas pada wilayah desa.	Mendorong terlaksananya pengembangan pariwisata dengan tidak terlibat langsung.	Mengetahui dampak pengembangan pariwisata.

Penerima manfaat	Tidak memberikan kontribusi dalam pengembangan wisata	Mendukung pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.	Menerima manfaat dari pengembangan desa wisata.
---------------------	--	--	--

Sumber: Data primer, 2021.

Adanya perbedaan peran masyarakat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dalam praktek, hal tersebut tidak dimaksudkan sebagai batasan dalam menjalankan peran setiap individu masyarakat. Akan tetapi, peran dari tiap individu tersebut bersifat dinamis dan dimungkinkan bersifat kolaboratif. Semisal, masyarakat berperan sekaligus baik sebagai pemrakarsa dan sebagai pelaksana dari pengembangan pariwisata, maka kontribusi dalam pengembangan desa wisata menjadi satu kesatuan. Batasan yang dibuat dimaksudkan hanya untuk mempertegas kontribusi didasarkan pada standar kemampuan secara universal, bukan untuk memberikan disparitas kontribusi diantara peran yang ada tersebut.

1. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata

Masyarakat harus dilibatkan dalam pengembangan desa wisata sejak dari awal, masyarakat dijadikan aktor utama mulai dari tahap identifikasi masalah hingga tahap penyelenggaraan desa wisata. Keterlibatan masyarakat sejak dari awal tersebut didasarkan kepada beberapa hal, yakni:

- a. Masyarakat merupakan bagian integral dari desa, sehingga berbagai bentuk kebijakan pembangunan yang ada di desa harus diketahui masyarakat sejak dari awal.
- b. Secara kultural, masyarakat memiliki partisipasi yang aktif dalam pembangunan, sehingga adanya pengembangan

desa wisata dengan melibatkan masyarakat sejak dari awal akan mendorong percepatan dan keberhasilan penyelenggaraan desa wisata.

- c. Masyarakat memiliki hak untuk menerima manfaat dari pengembangan desa wisata sejak dari awal proses identifikasi masalah.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata dapat dilihat alur gambar berikut:



Gambar 22. Alur Proses Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata
Sumber: Data primer, 2021.

Proses identifikasi pengembangan desa wisata merupakan penggalian secara benar mengenai hal-hal yang dianggap mampu dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Dalam proses ini, masyarakat dilibatkan langsung untuk mengenali sendiri potensi yang ada di desanya. Menjadi penting dikarenakan

masyarakat merupakan pemilik dari potensi yang ada di desa.

Penggalian yang dilakukan oleh masyarakat sendiri mampu melahirkan kajian yang utuh mengenai potensi yang sebenarnya ada dan bisa dikembangkan sesuai dengan pemahaman, kebutuhan, kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Manfaat penggalian potensi oleh masyarakat memberikan pengetahuan sejak awal bagi masyarakat mengenai potensi yang dimiliki desa (Ayub dkk, 2020). Masyarakat memiliki gambaran mengenai seperti bentuk pengembangan potensi tersebut hingga menjadi daya tarik dalam pengembangan desa wisata.

Proses pengembangan desa wisata di Kabupaten Enrekang merupakan tahapan dimana potensi desa wisata direncanakan untuk dikembangkan menjadi objek wisata. Dalam proses ini, masyarakat dilibatkan sebagai pihak yang memiliki hak menyusun perencanaan pengembangan desa wisata, seperti penetapan tujuan, penyusunan program dan rencana kegiatan sampai dengan penetapan rencana anggaran (Desi, 2021). Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengembangan desa wisata menjadi penting, hal ini didasarkan kepada alasan sebagai berikut:

Mengakomodasi keinginan dan tuntutan masyarakat, pengembangan desa wisata harus didasarkan atas adanya keinginan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di desanya sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat ditujukan untuk memastikan bahwa pengembangan desa wisata sesuai dengan keinginan dan tuntutan masyarakat.

Membangun partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan desa dimana keterlibatan masyarakat ditujukan untuk menggugah rasa kepemilikan masyarakat terhadap potensi desa wisata yang dikembangkan sehingga masyarakat

memiliki kehendak untuk terlibat dan memiliki rasa memiliki terhadap pengembangan desa wisata.

Sarana bagi masyarakat untuk menumbuhkan dan memperkuat kelembagaan masyarakat yang ada, hal ini dikarenakan keterlibatan masyarakat secara bersama-sama dalam mengembangkan desa wisata akan meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengembangan potensi yang dimilikinya, sehingga pada akhirnya akan menciptakan kelembagaan masyarakat yang kuat.

Penyelenggaraan desa wisata yang ada di Kabupaten Enrekang merupakan proses untuk mewujudkan tujuan pengembangan desa wisata. Dalam proses ini masyarakat dilibatkan baik sebagai penyelenggara maupun sebagai penerima manfaat. Peran masyarakat sebagai penyelenggara merupakan hak masyarakat untuk mengelola desa wisata, keberlangsungan dan keberlanjutan desa wisata menjadi hak masyarakat, sedangkan peran masyarakat sebagai penerima manfaat ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini menjadi penting dikarenakan masyarakat harus menjadi pihak pertama yang diuntungkan dalam pengembangan desa wisata.

Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan desa wisata menjadi penting untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah bisa dicapai atau belum, masyarakat memiliki hak untuk menilai keberhasilan tersebut dikarenakan dari proses awal masyarakat sudah dilibatkan sehingga dalam proses penilaian terhadap penyelenggaraan desa wisata, masyarakat jauh lebih mengetahui dibanding dengan pihak lainnya. Selain itu, evaluasi terhadap penyelenggaraan desa wisata yang dilakukan oleh masyarakat meningkatkan kemampuan dari berbagai bidang, masyarakat mampu menciptakan akuntabilitas dalam keseluruhan proses penyelenggaraan desa wisata.

2. Peran Desa Wisata dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pemulihan ekonomi bangsa, khususnya pada tingkatan daerah harus bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi yang berbasis kerakyatan. Kabupaten Enrekang yang memiliki luas wilayah 1.786,01 KM² dan tepatnya berada pada jantung di Sulawesi Selatan dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 255.172 jiwa. Luas lahan pertanian cabai yang produktif sekitar 1.093 ha yang tersebar pada 12 Kecamatan dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi produktif (Maddatuang dkk, 2021). Dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Enrekang. Penduduknya sebagian besar pemeluk Agama Islam dengan mata pencaharian utama pada Sektor Pertanian ($\pm 65\%$).

Pemerintah Daerah harus membuatkan regulasi aturan dalam bentuk Peraturan Daerah dalam peranan desa wisata di seluruh Desa yang jumlahnya 112. Tujuannya ialah untuk meningkatkan laju roda ekonomi pada masyarakat berbasis pedesaan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang muaranya berimplikasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Karim, 2021).

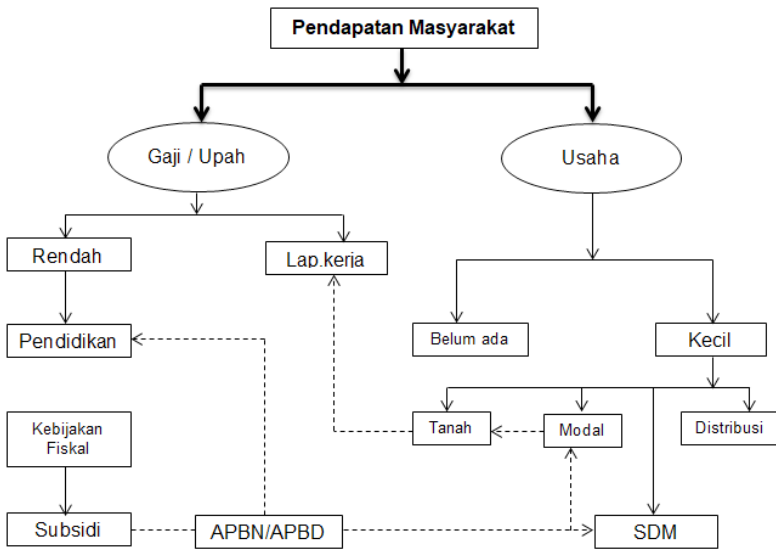
Desa wisata saat ini merupakan merupakan ujung tombak pemerintah pusat pada beberapa kementerian sebagai sarana dalam pertumbuhan ekonomi skala nasional. Berbagai persoalan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan secara merata dan sistematis. Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat dalam peningkatan ekonomi, karena semakin ketatnya persaingan ekonomi global dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, inflasi masih menghantui perekonomian nasional, penurunan nilai mata uang terus merangkak dan

problematika lainnya yang saling bergesekan, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Untuk meningkatkan pembangunan nasional harus dimulai dari bawah, yaitu pembangunan secara *bottom up*. Pembangunan nasional bisa berhasil jika dilakukan dengan mengintegrasikan pembangunan pedesaan sebagai ujung tombak pemerintah pusat. Melalui UU Desa tahun 2014, pemerintah sudah menyiapkan berbagai program pendampingan dan pembangunan desa secara menyeluruh. Alokasi Dana Desa sebanyak Rp. 1 M setiap Desa yang telah digelontorkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dalam rangka pembangunan desa dalam mengoptimalkan pembangunan desanya serta memanfaatkan seluruh potensi desa melalui desa wisata.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa sesuai dengan UU Desa salah satunya adalah dengan melakukan terobosan akselerasi melalui peran masyarakat secara hegemonik. Desa wisata harus dirancang sebagai salah satu instrument penting pada upaya peningkatan pendapatan ekonomi desa dan kesejahteraan berbasis pedesaan. Desa wisata sebagai lumbung ekonomi desa di Kabupaten Enrekang harus dilakukan secara integrasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat desa. Desa wisata dapat dijadikan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi pedesaan, sehingga dapat menghasilkan produk unggulan desa yang dapat dipasarkan pasar regional, nasional dan international. Desa wisata sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan pada sektor ekonomi masyarakat, sebab desa wisata dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan usia. Desa wisata harus dirancang dan dijalankan sebagai program unggulan dari semua lapisan jenjang pemerintahan di Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Berikut adalah salah satu contoh problem spesifik yang dihadapi masyarakat dalam bidang akses faktor produksi modal.



Gambar 23. Pemasalahan Masyarakat Desa dalam Bidang Ekonomi

Sumber: Data primer, 2021.

Sebagian besar masyarakat yang belum memiliki usaha, atau kalaupun memiliki, maka mereka menghadapi kendala dalam hal modal, dan atau tanah, dan atau kemampuan sumberdaya manusia, dan distribusi (baik pada pasar *input* maupun pada pasar *output* atau pasar barang). Keempat kendala ini saling berkaitan satu sama lain. Oleh sebab itu dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dari sisi surplus usaha, maka perlu ditangani secara komprehensif (Helmsing, 2003).

Letak peran desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain:

- a. Identifikasi potensi desa
- b. Pemetaan usaha unggulan desa
- c. Membangun sentra ekonomi yang terintegrasi, dan
- d. Memasarkan produk unggulan desa.

Desa wisata merupakan pilar pembangunan desa yang digalakkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai sebuah sentral ekonomi desa, diharapkan desa wisata mempunyai peran dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat desa, dan peningkatan ekonomi desa.

Ekonomi pedesaan harus dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki. Potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya infrastruktur dan sumber daya struktur. Persoalan kesejahteraan masyarakat desa bermula dari tingkat ekonomi masyarakat desa yang rendah. Strategi pembangunan desa harus dilakukan secara komprehensif dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia desa juga perlu untuk terus ditingkatkan dengan berbagai program dan pendampingan. *Goal* yang diharapkan adalah terciptanya masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas.

Desa wisata sangat erat kaitannya dengan masyarakat karena sarana tersebut sebagai penyedia ruang layanan bagi masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan guna untuk mengembangkan perekonomian skala desa. Potensi-potensi unggulan desa yang dikelola dengan baik menambah pendapatan masyarakat, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang belum dikelola. Selain itu, dapat memperbaiki fasilitas penunjang di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara spesifik lagi desa wisata merupakan salah satu sarana desa yang bergerak dalam bidang sosial ekonomi serta berfungsi sebagai penyedia layanan, khususnya terhadap masyarakat desa. Desa wisata menjadi sangat penting perannya mengingat dalam pembangunan *multi-sector* pedesaan, tentunya tidak jauh kaitannya dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan pada zona pedesaan. Dalam persepektif kemandirian ekonomi, ekonomi desa memiliki alternatif kelembagaan yang rasional dan unik. Desa seringkali dipandang sebagai suatu bagian kecil, terbelakang dan begitu lemah. Perlu adanya suatu badan yang dapat mengubah cara pandang masyarakat mengenai adanya peran penting sebuah desa dalam suatu perekonomian.

3. Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

- a. Proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi.
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
- c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi.
- d. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan

dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya yang mandiri.

- e. Membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).

Proses meningkatkan keberdayaan warga masyarakat melalui proses pemberdayaan yang terwujud dari modal sosial, modal manusia, modal fisik dan kemampuan pelaku. Hal ini dapat memberikan solusi yang lebih baik karena dapat menambah penjelasan bahwa proses pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan untuk mencapai keberdayaan masyarakat. Ada dua pola untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Enrekang berpengaruh secara signifikan terhadap keberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan ini ditandai adanya kemampuan masyarakat dalam membuat analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi suatu program pemberdayaan (Garrod, 2001). Peran pelaku perlu diperbaiki dalam pengetahuan dan ketrampilannya agar dapat memberi dukungan dalam memperlancar keberhasilan pemberdayaan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.

Peningkatan keberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui proses pemberdayaan karena adanya peran modal manusia dan modal fisik. Temuan ini memberikan solusi bahwa modal usaha yang meliputi modal fisik dan modal manusia tidak secara otomatis menghasilkan keberdayaan masyarakat. Pengembangan modal fisik menstimulasi pengembangan modal manusia yang mendukung proses pemberdayaan yang pada akhirnya meningkatkan keberdayaan masyarakat seperti pada Gambar 24. Untuk dapat meningkatkan keberdayaannya, masyarakat tidak hanya cukup melakukan pengembangan modal

fisik saja, tetapi juga harus meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya sebagai syarat kesuksesan dalam melakukan pemberdayaan. Masa Pandemic Crisis Global saat ini, masyarakat harus mampu dan berani mengambil keputusan untuk melakukan usaha baru untuk masa depan. Hal tersebut sangat dimungkinkan melalui program desa wisata yang dikembangkan secara massif di Kabupaten Enrekang meliputi 112 desa yang ada.

Peningkatan keberdayaan masyarakat memerlukan satu paket secara koheren dari perubahan modal fisik yang dibangun berdasarkan kekuatan sarana dan prasarana pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia dan kemampuan pelaku pemberdayaan dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 24, berikut ini:



Gambar 24. Pola Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Wisata

Sumber: Data primer, 2021.

Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh pembangunan pedesaan dan berbagai pengalaman kegagalan proyek pemerintah, diperlukan sebuah pendekatan baru yang mampu mensinergikan antara pembangunan pedesaan dan peningkatan daya saing yang mampu memberdayakan ekonomi lokal. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah *Local Economic Development (LED)* atau pembangunan ekonomi lokal. *Local Economic Development (LED)* berusaha melakukan upaya pemanfaatan sumber daya yang ada yaitu sumberdaya fisik, manusia dan kelebagaannya. Dalam istilah lain, *Local Economic Development (LED)* merupakan pemanfaatan faktor-faktor internal lokal guna untuk pengembangan ekonomi lokal. Dengan pendekatan ini diharapkan ada sinergi antara pembangunan pedesaan yang menyeluruh dan mampu meningkatkan daya saing desa.

Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal berbasis pedesaan.

Hampir pada setiap program pemberdayaan, aspek pengembangan sumberdaya manusia dijadikan salah satu komponennya. Tetapi juga hampir disemua program pemberdayaan, aspek pengembangan sumberdaya manusia ini hanya dilakukan ala kadarnya. Tidak ada usaha sistematis dan rencana strategis untuk pengembangan sumberdaya manusia dalam

rangka pengembangan ekonomi rakyat. Pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pemberdayaan ekonomi, sebab sumberdaya manusia adalah unsur paling fundamental dalam penguatan ekonomi suatu daerah.

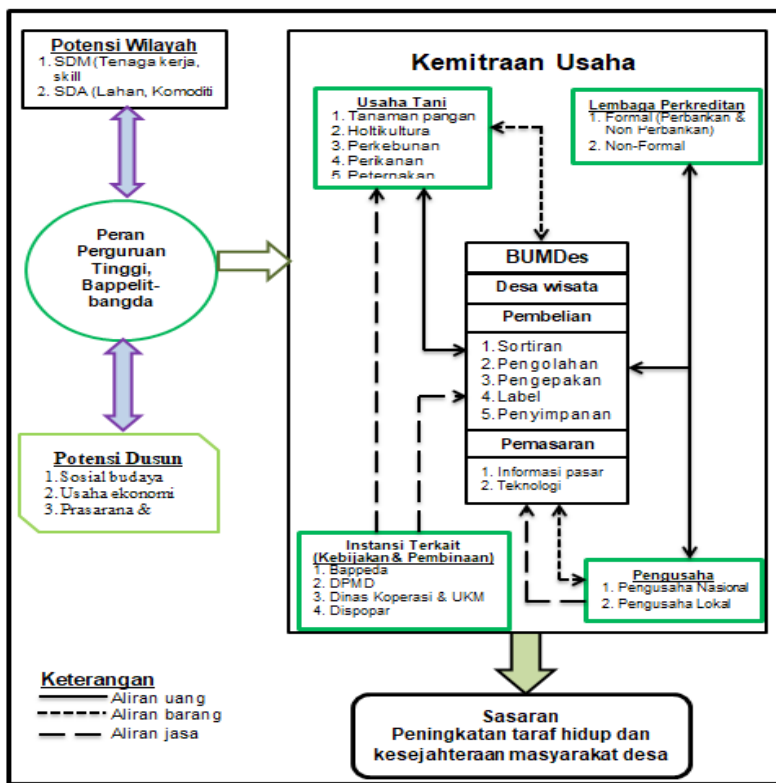
Pengembangan komoditas unggulan di daerah berbasis *local wisdom* melalui desa wisata, membuka peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat desa. Suatu peluang usaha menjadi sumber pendapatan dan pekerjaan yang memberikan nilai tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri. Hal kedua adalah kemampuan mengorganisir sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual dapat diope-rasikan.

Tujuan pembangunan daerah bersumbu pada wilayah pedesaan adalah untuk membangun kapasitas secara koboratif, tentunya meningkatkan masa depan ekonominya dan kualitas hidup penduduk desa. Pembangunan daerah pedesaan memberikan kontribusi penting bagi kinerja ekonomi pada tingkat-an daerah dan menjadi lebih kritis dengan meningkatnya persaingan nasional dan global. Mobilitas penduduk, kemajuan teknologi, dan perbedaan dan ketidakseimbangan spasial yang diakibatkannya (Fitari & Ma'rif, 2017). Pembangunan ekonomi lokal yang efektif dapat mengurangi kesenjangan antara miskin dan kaya, menambah persediaan lapangan pekerjaan.

Jika hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka yang dihasilkan secara lokal, yakni meningkatkan investasi sektor swasta secara keseluruhan, meningkatkan arus in-

formasi dengan investor dan pengembang, dan meningkatkan koherensi serta kepercayaan yang digunakan dalam strategi ekonomi lokal. Hal ini juga dapat meningkatkan penilaian diagnostik yang lebih baik atas aset ekonomi lokal dan keuntungan khusus, dan mengarah pada penilaian strategi yang lebih kuat.

Ketersediaan prasarana rangkaian kerja dari faktor dan sarana, dimensi ketiga pendukung ekonomi pedesaan tersebut disajikan pada berikut:



Gambar 25. Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Sumber: Data olahan, 2021.

Seiring banyaknya sektor UMKM yang tidak beroperasi, maka dipastikan jika angka pengangguran dan kemiskinan meningkat secara signifikan setiap periodik. Kluster ekonomi merupakan sekumpulan usaha atas produk barang/jasa tertentu dalam suatu wilayah, yang membentuk kerjasama dengan usaha pendukung dan usaha terkait untuk menciptakan efisiensi kolektif berdasarkan kearifan lokal guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut dalam kluster harus menunjukkan kesatuan hubungan aktivitas khusus antara berbagai perusahaan (*companies*), pemasok (*suppliers*), jasa pelayanan (*service providers*), dan institusi kelembagaan (*associated institutions*) yang terkonsentrasi secara geografis pada suatu wilayah baik daerah, regional maupun nasional.

Oleh karena itu, kluster merupakan elemen penting dalam perumusan kebijakan ekonomi, stabilisasi ekonomi makro, privatisasi, peluang pasar, dan bisnis. Batasan kluster ekonomi menurut definisi tersebut relatif komprehensif atau utuh karena kluster dapat dijabarkan kedalam alur ***input, proses, output*** dan ***outcome*** dari pengembangan kluster secara jelas. Input dalam kluster terdiri dari sekumpulan usaha atas produk/jasa tertentu sebagai usaha industri inti, usaha pendukung (industri pendukung dan lembaga pendukung), usaha terkait seperti usaha yang bisa dikerjasamakan dengan usaha inti diluar usaha pendukung. Menurut prosesnya, kluster ekonomi merupakan kerjasama yang mampu menciptakan efisiensi kolektif.

Usaha inti saling berhubungan secara intensif dan membentuk kemitraan dengan industri pendukung dan usaha terkait dengan didukung oleh jasa-jasa/prasana pendukung. Dengan demikian meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya transaksi, menciptakan aset secara kolektif, dan meningkatkan inovasi sehingga bermanfaat untuk mendorong spesialisasi produk

(bahkan proses) dan mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Output yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan terakhir dari penetapan kebijakan klaster bukan hanya untuk kemajuan dunia usaha tetapi juga masyarakat secara luas diuntungkan antara lain melalui tersedianya produk/jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan bahan baku lokal dan terjaganya keseimbangan lingkungan sekitar.

Demikian klaster juga menjaga tiga pilar keberhasilan dunia usaha, yang dikenal dengan sebutan 3P yaitu *profit* (keuntungan), *people* (kesejahteraan), dan *planet* (lingkungan). Berdasarkan implementasinya, klaster ekonomi paling tidak mengandung tiga unsur, yaitu: (1) kedekatan geografis, mencakup kegiatan lintas komoditas dan lintas sektoral; (2) kesatuan sektor industri, meliputi kegiatan lintas daerah dan komoditas; dan (3) kesamaan komoditas yang berkaitan dengan kegiatan lintas daerah.

Dalam klaster ekonomi terkandung beberapa prinsip, yakni:

- a. Skala ekonomi (*economic scale*) berorientasi regional, bukan bersifat pendekatan tunggal terhadap komunitas atau institusi tertentu (*not a single community or jurisdiction*).
- b. Tantangan ekonomi (*economic challenge*) menjawab tantangan kebutuhan restrukturisasi ekonomi dalam rangka meningkatkan efektifitas penggunaan masukan (*input*) ekonomi.
- c. Titik tumpu ekonomi (*economic focus*) memiliki visi berorientasi pengembangan kelompok klaster regional

(*regional cluster portfolio*), bukan hanya semata mengembangkan industri atau perusahaan tertentu.

- d. Kepemimpinan dan proses strategi (*leadership and strategy process*) memiliki pimpinan dan organisasi yang peduli terhadap pengembangan ekonomi regional melalui proses pendekatan komprehensif dan kolaboratif terhadap aneka bentuk industri dan institusi.
- e. Kapasitas dalam mengambil tindakan (*capacity to take action*) mengambil tindakan secara regional melalui optimalisasi penggunaan sumberdaya teknis dan keuangan dengan tujuan memperoleh manfaat buat kepentingan bersama. Dalam pembangunan pedesaan, klaster dapat dikategorikan sebagai hubungan interdependensi antara wilayah desa itu sendiri dan daerah sekitarnya (termasuk perkotaan).

Klaster yang hendak dibentuk seyogyanya sejalan dengan kebijakan *Local Economic Development (LED)*. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi dan pemetaan potensi ekonomi lokal, analisis, penetapan produk unggulan dan kesepakatan klaster, penyusunan rencana tindak dan bisnis klaster, dan pengembangan klaster. Identifikasi dan pemetaan kondisi ekonomi lokal ditujukan untuk mengidentifikasi potensi lokal, faktor-faktor pendukung, serta lingkungan strategis yang diperlukan sebagai pengungkit pengembangan klaster dan produk unggulan. Identifikasi klaster juga harus merefleksikan potensi-potensi yang berkaitan dengan permintaan pasar, perekonomian, manfaat bagi rumah tangga miskin, dampak berganda bagi perekonomian, dan keberhasilan.

Pendekatan yang paling representatif untuk mengetahui potensi-potensi tersebut adalah melalui kegiatan penelitian. Kegiatan pemetaan kondisi ekonomi lokal ini dapat menggu-

nakan pendekatan model *Rapid Appraisal Techniques for Local Economic Development (RALED)* Bappenas yang diperkaya dengan analisis pengaruh *Local Economic Development (LED)* terhadap pembangunan daerah. Analisis kluster dilakukan dalam usaha untuk mengidentifikasi dan menentukan produk unggulan daerah. Kriteria utama penentuan produk unggulan ini adalah produk yang memiliki nilai tambah yang besar, memiliki multiplier usaha lokal yang luas, serta memiliki daya saing dalam bisnis usaha domestik maupun internasional.

Menggali informasi *multiplier effect* dan nilai tambah usaha setiap produk lokal dilakukan analisis *value chain* proses produksi masing-masing produk usaha. Selain itu, analisis kluster juga harus mengacu pada konsep yang melandasinya. Konsep dan implementasi analisis kluster meliputi:

- a. Orientasi pasar dengan fokus pada mekanisme efektivitas penawaran dan permintaan.
- b. Inklusif dengan cakupan kegiatan fasilitasi lembaga ekonomi terkait.
- c. Kerjasama dalam solusi permasalahan secara kolaboratif dan partisipatif.
- d. Strategis dalam rangka memotivasi dedikasi kerja para pemangku kepentingan.
- e. Nilai tambah bagi pendapatan lokal.

Kelima konsep dan implementasi analisis kluster tersebut merupakan pengejawantahan dari hasil identifikasi dan pemilihan kluster sebagaimana telah diuraikan di atas. Setelah analisis kluster, langkah berikutnya adalah penetapan dan kesepakatan kluster berdasarkan produk unggulan daerah dapat berupa beberapa produk dan kluster usaha yang berpotensi pa-

ling baik dan memiliki daya saing usaha untuk mendukung *Local Economic Development (LED)* di daerah.

Upaya mendukung pengembangan klaster, diperlukan rencana tindak dan bisnis klaster terdiri dari program prioritas strategis yang dilakukan dalam rangka mendukung fokus kegiatan pengembangan klaster dan produk unggulan daerah. Setelah itu baru dilakukan pengembangan klaster. Langkah-langkah pengembangan klaster mencakup:

- a. Mobilisasi para pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan pengembangan minat dan partisipasi.
- b. Diagnosis atau penilaian klaster dalam hubungannya dengan ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian.
- c. Strategi kerjasama dalam bentuk pengorganisasian perusahaan di setiap kluster.
- d. Implementasi berupa pengembangan dedikasi peserta kelompok kerja klaster dan para pemangku kepentingan.

Pengamatan peneliti selama di lapangan, yakni sumberdaya manusia (SDM) dan lembaga ekonomi desa yakni, Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) belum memadai dalam mendukung peranan desa wisata dan lembaga ekonomi lainnya berjalan secara efektif. Dari berbagai prespektif mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, mapun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan

problem spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik.

Pendapatan masyarakat yang selama ini pada sektor non formal yang jumlah lebih dominan dibandingkan sektor formal berdasarkan data angkatan kerja di Indonesia. Pemerintah telah mengalokasikan APBN melalui Dana Desa, kurang lebih sebanyak Rp. 112 M per tahun di Kabupaten Enrekang. Dalam setiap tahun belum mampu memberikan kontribusi positif terhadap *trend* peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membuka peluang ekonomi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa.

4. Peningkatan Daya Saing Desa Berbasis Kebijakan *Local Economic Development* (LED)

Secara teoritis, sinergi kebijakan *Local Economic Development* (LED) dan pembangunan pedesaan dalam upaya peningkatan daya saing desa terwujud apabila identifikasi dan analisis klaster ekonomi serta pembentukan forum kemitraan berjalan sesuai dengan prosedur sebagaimana telah diuraikan di atas. Akan tetapi, implementasinya memerlukan kesamaan persepsi dan jalinan komitmen berikut konsolidasi dalam bentuk kolektifitas perencanaan dan keputusan partisipatif antar para pemangku kepentingan. Untuk itu, perlu disusun langkah strategi (*road map strategy*) guna menjembatani dan sekaligus merealisasikan sinergi kebijakan tersebut.

Pemaknaan terhadap pemberdayaan lebih spesifik mengarah pada peningkatan kemampuan, kapasitas, produktivitas, kreativitas dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam mengakses sekaligus mengontrol berbagai sumber kehidupan penting. Peningkatan

daya keinovatifan dalam proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui rangkaian tahapan berikut:

- a. Tahap penyadaran;
- b. Tahap penumbuhan minat dan ketertarikan;
- c. Tahap penilaian;
- d. Tahap mencoba dalam skala kecil; dan
- e. Tahap menerapkan solusi terpilih untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi.

Guna menghindari bias tujuan, pemberdayaan perlu ditafsirkan sebagai suatu proses atau mekanisme yang menggerakkan partisipasi aktif individu, kelompok dan masyarakat hingga mumpuni menyelesaikan permasalahan sendiri. Penetapan tujuan pemberdayaan perlu disesuaikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat sehingga pemberdayaan mengasumsikan bahwa:

- a. Pemberdayaan akan berbeda bentuk untuk orang yang berbeda;
- b. Pemberdayaan akan berbeda untuk konteks yang berbeda; dan
- c. Pemberdayaan berfluktuasi atau berubah seiring perjalanan waktu.

Berikut pola hubungan sosial masyarakat desa dengan pertukaran ekstrinsik dan intrinsik digambarkan pada tabel 11 berikut:

Tabel 10.
Pola Hubungan Sosial Masyarakat Desa
dengan Ekstrinsik dan Intrinsik

Pola Hubungan Sosial	Motif hubungan Sosial	Kepentingan Hubungan Sosial
Ekstrinsik (antara anggota masyarakat desa dengan pihak luar)	Ekonomi	Memperoleh imbalan berupa nilai rupiah dari pihak lain. Memperoleh simpatik dari pihak lain agar tertarik membeli produk yang ditawarkan. Ada proses transaksi, negosiasi dan tawar menawar antar pelaku hubungan sosial. Memberi manfaat ekonomi bagi pihak yang berhubungan. Mendukung kegiatan produktif <i>Local Economic Development</i> (LED). Penguatan hubungan bisnis petani dan pedagang pelanggan.
	Sosial	Jalinanpersaudaraan/ pertemanan antara petani dan warga desa lain dengan pengelola potensi ekonomi desa. Saling bantu dalam kegiatan sosial budaya dan pemeliharaan kebersihan lingkungan desa.

<p>Intrinsik (antara sesama anggota masyarakat desa)</p>	<p>Sosial</p>	<p>Memperoleh pengertian, pemahaman, kepedulian, perhatian dan bentuk sosial reward lain. Mempererat solidaritas dan kolektivitas kerja dalam kelompok masyarakat desa. Menjaga kerukunan antar warga masyarakat desa. Memperkuat fungsi kelembagaan sosial. Pertukaran pengalaman kerja produktif dalam pengembangan potensi desa. Penguatan rasa pertemanan dan persahabatan</p>
	<p>Ekonomi</p>	<p>Berbagi informasi tentang potensi unggulan desa yang dapat dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional berbasis pedesaan.</p>

Sumber: Data Primer, 2021.

Setiap diseminasi model pemberdayaan, hubungan sosial selalu memegang fungsi penting. Penjalinan hubungan sosial seringkali dibentuk berdasarkan kepentingan subjektif yang diwarnai orientasi diri dan orientasi kolektif. Pada orientasi diri, hubungan sosial dijalin dengan lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Adapun pada orientasi kolektif yang

dikedepankan kepentingan kebersamaan. Pada berbagai bentuk hubungan sosial masyarakat desa yang diteliti ditemukan kedua jenis orientasi ini saling menguatkan untuk pencapaian ragam kepentingan anggota masyarakat dan pihak lain. Kadang kala terjadi dilema pada hubungan sosial ketika orientasi diri berjalan tak seiring dengan orientasi kolektif.

Paling tidak ada Lima langkah strategi kebijakan yang perlu diupayakan dalam mewujudkan implementasi sinergi kebijakan *Local Economic Development (LED)* dan pembangunan pedesaan dalam upaya peningkatan daya saing desa. Kelima langkah strategi tersebut adalah penyiapan dan penguatan platform kelembagaan, pemetaan dan analisis kondisi kluster ekonomi desa, penyusunan rencana tindak dan rencana bisnis, implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Penyiapan dan penguatan *platform* kelembagaan diperlukan sebagai fondasi awal berjalannya sinergi kebijakan kebijakan *Local Economic Development (LED)* dan pembangunan pedesaan dalam upaya peningkatan daya saing desa. Kelembagaan yang terbentuk merupakan pelaksana, pendamping, supervisi dan pengevaluasi program yang ada.

Kelembagaan tersebut juga diperlukan untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi penting dilakukan dalam rangka mengenalkan sinergi kebijakan *Local Economic Development (LED)* dan pembangunan pedesaan dalam upaya peningkatan daya saing, terutama bagi kalangan para pemangku kepentingan. Konkretnya sosialisasi dilaksanakan melalui forum-forum pertemuan atau dengan memanfaatkan media komunikasi teknologi informasi. Pemetaan dan analisis kondisi kluster ekonomi desa diperlukan untuk mendapatkan produk unggulan desa yang dijadikan kluster dan menjadi *prime over* bagi perekonomian desa di Kabupaten Enrekang.

Sinergi kebijakan *Local Economic Development (LED)* dan Pembangunan Pedesaan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dapat diilustrasikan sebagaimana tertera pada Gambar 26 dibawah. Dalam hal ini perlu dibentuk rekayasa kelembagaan yang sejalan dengan dua strategi pokok kebijakan *Local Economic Development (LED)*, yaitu kluster ekonomi dan forum kemitraan.



Gambar 26. Sinergi Kebijakan LED dan Pembangunan Pedesaan dalam Peningkatan Daya Saing
Sumber: Data primer, 2021.

Berdasarkan gambaran tersebut, kluster ekonomi dan lembaga kemitraan merupakan dua kunci pokok dalam kebijakan *Local Economic Development (LED)*. Secara konkrit, *Local Economic Development (LED)* diimplementasikan dalam beberapa langkah dengan tujuan dan target/sasaran kegiatan yang hendak dicapai. Secara garis besar, langkah kegiatan *Local Economic Development (LED)* diawali dari proses sosialisasi, fasilitasi, hingga rekayasa kelembagaan. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran diantara para pemangku kepentingan, mobilisasi sumberdaya dalam wacana kemitraan, hingga pengembangan kelembagaan yang berdayaguna dalam jangka panjang.

Sementara itu, target dan sasaran *Local Economic Development (LED)* harus sejalan dengan langkah dan tujuannya yaitu mulai dari timbulnya kesadaran para pemangku kepentingan terhadap eksistensi *Local Economic Development (LED)*, termobilisasinya sumberdaya sesuai dengan kebutuhan, hingga terlembaganya (*institutionalized*) LED. Untuk mengoptimalkan keberadaan klaster produk unggulan desa tersebut, maka diperlukan rencana tindak dan rencana bisnis klaster yang dapat dijadikan arahan dalam implementasinya. Implementasi dan pengawalan sinergi kebijakan *Local Economic Development (LED)* dan pembangunan pedesaan dalam upaya peningkatan daya saing desa dilakukan oleh forum kemitraan yang dalam hal ini kelembagaan yang terbentuk.

Menjalin ragam bentuk hubungan sosial, masyarakat desa di Kabupaten Enrekang, khususnya pada 6 (enam) Kecamatan, yakni Kecamatan Alla, Anggeraja, Baraka, Buntu Batu, Curio, dan Malua berusaha berperilaku yang mengarah pada pembentukan proses sosial asosiatif. Proses sosial asosiatif terutama terkait kerukunan masyarakat desa dijaga dengan langgeng melalui penguatan hubungan sosial berpola internal Mayoritas masyarakat merasa puas dengan hasil pekerjaan yang ditekuni sehari-hari. Beberapa alasan yang dikemukakan subjek responden mendasari rasa ketidakpuasan masyarakat desa terhadap partisipasi lembaga ekonomi desa yang saat ini dalam partisipasi pertumbuhan ekonomi desa. Hal ini tertera pada Gambar 27 sebagai berikut:



Gambar 27. Alasan Ketidakpuasan Masyarakat dalam Pengelolaan Lembaga Ekonomi Desa

Sumber: Data primer, 2021.

Kegiatan monitoring yang perlu dilakukan oleh *the local government policymakers* dalam rangka merealisasikan pelaksanaan sinergi kebijakan *Local Economic Development (LED)* dan pembangunan pedesaan dalam upaya peningkatan daya saing desa oleh kelembagaan yang sudah terbentuk sebelumnya. Kegiatan evaluasi ditujukan untuk menilai kinerja pelaksanaan sinergi kebijakan *Local Economic Development (LED)* dan pembangunan pedesaan. Upaya peningkatan daya saing desa, serta perangkat pendukungnya dalam rangka untuk merumuskan perbaikan program dan penguatan perangkat pelaksana program desa wisata. Dalam melakukan evaluasi diperlukan penyusunan perangkat pemantauan program. Model pemantauan dan evaluasi ini salah satunya memasukkan variabel daya saing sebagai kriteria *outcome* keberhasilan dari program desa wisata. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini di-

lakukan sebagai upaya melakukan inovasi dan pengembangan metode pendekatan terus dilakukan dalam rangka perbaikan program dan strategi kebijakan dalam fase/ siklus berdasarkan dari *the local government policymakers*.

5. Peran Teknologi dalam Pengembangan Desa Berbasis Website

Desa mempunyai peran yang begitu urgent dalam menentukan keberhasilan pembangunan pada tingkat kabupaten. Pelaksanaan berbagai program pemerintah desa di Kabupaten Enrekang sangat tergantung kepada penyusunan perencanaan yang berpangkal pada data dan informasi yang disusun desa secara sistematis, lengkap, akurat dan terpadu. Peran desa sebagai tempat, tumpuan dari masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prima dan sebagai *frontline* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta sebagai sumber data dan informasi dalam penetapan berbagai kebijakan pemerintah.

- a. Guna mewujudkan pelayanan prima pada seluruh desa di Kabupaten Enrekang diperlukan strategi, antara lain:
- b. Pengelolaan administrasi dan arsip harus didukung sarana prasarana berbasis sistem informasi berbasis teknologi.
- c. Sistem Informasi Desa (SID), merupakan manajemen dalam pendekatan sistem informasi di masa 4.0.
- d. Suatu sistem yang diciptakan untuk mengelola sistem administrasi berbasis ketepatan layanan.

Filosofinya adalah menggunakan sesedikit mungkin kertas dan digitalisasi dokumen. Manfaatnya adalah meningkatkan produktivitas, hemat biaya, efisien tempat dan mengurangi

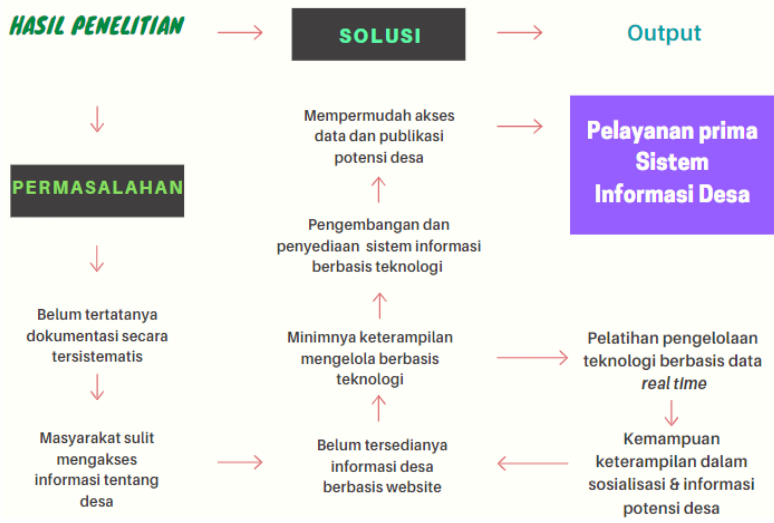
dampak lingkungan. Dalam implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dan manajemen desa mewujudkan cita-cita untuk membiasakan diri mengolah dan membaca dokumen dalam bentuk digital, dengan kata lain mengurangi pemakaian kertas sebagai bahan pokok penulisan dokumen serta mampu diakses secara lebih oleh siapapun.

Ada beberapa manfaat yang di tawarkan oleh penggunaan Sistem Informasi Desa (SID), antara lain:

- a. Efisien waktu
- b. Manajemen Dokumentasi lebih baik
- c. Kenyamanan kerja lebih baik
- d. Mendukung terjadinya keputusan yang lebih baik
- e. Manajemen lebih terkendali
- f. Membaiknya citra pemerintahan desa.

Pada dasarnya Sistem Informasi Desa (SID) memiliki banyak manfaat selain ramah lingkungan karena tidak menambah sampah juga cukup membantu mengurangi tumpukan kertas di meja kerja atau belajar. Ditambah lagi dengan format digital itu penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Pembuatan sistem informasi yang ter *update* merupakan sumber data dan informasi bagi semua penyusunan program pembangunan desa di Kabupaten Kabupaten. Upaya penyajian data administrasi desa secara menyeluruh, terpadu, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya perlu disusun dalam bentuk Sistem Informasi Desa (SID).

Mewujudkan upaya tersebut, peneliti merumuskan skema pengembangan desa berbasis informasi dan teknologi berbasis *website* seperti gambar 28 sebagai berikut:



Gambar 28. Skema Pengembangan Desa melalui Informasi dan Teknologi Berbasis *Website*
 Sumber: Data primer, 2021.

Jumlah desa di Kabupaten Enrekang sebanyak 112 hampir semua memiliki ragam potensi dalam pengembangan desa wisata. Berdasarkan dari jawaban responden yang telah kami berikan pertanyaan untuk kegiatan penelitian ini. Melalui sarana informasi dan teknologi, bukan hanya sekedar pengembangan berdasarkan infrastruktur saja yang dapat dipublikasi melainkan juga terkait promosi potensi desa dapat dilakukan secara *real time*. Metode untuk mempromosikan potensi desa paling mutakhir ialah menggunakan *website desa*. *Web* desa memiliki segudang manfaat sebagai media promosi potensi daerah. Di samping dapat meningkatkan kredibilitas, *website* juga merupakan bentuk promosi paling hemat serta mampu terhubung langsung dengan khalayak luas secara cepat tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi terutama internet saat ini membawa kemajuan yang sangat pesat

di berbagai bidang kehidupan. Dengan adanya website membantu banyak pihak dari individu, organisasi, pemerintah bahkan swasta untuk bisa menghadirkan informasi terkini melalui media digital. Hal ini pun yang semakin menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa untuk mengembangkan pelayanan dan meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ada banyak manfaat website untuk desa yang dapat membantu kemajuan desa tersebut, antara lain:

1. **Pemberi Informasi.** Website digunakan sebagai pemberi informasi segala hal tentang desa tersebut kepada masyarakat luas. Informasi tersebut bisa berupa profil, potensi desa, berita terkini, transparansi pendanaan desa, kinerja perangkat desa dan sebagainya. Dengan adanya website tersebut, maka masyarakat luas tidak perlu susah-susah untuk mencari informasi yang dibutuhkan.
2. **Media publikasi.** Hampir sama dengan fungsi utama website sebagai pemberi informasi, website khusus desa dibuat sebagai media publikasi. Website akan memuat keberadaan desa hingga ke seluruh Indonesia bahkan dunia.
3. **Pengumuman desa.** Website juga bermanfaat sebagai pemberi pengumuman desa. Jadi, apabila desa tersebut ingin mengedarkan pengumuman maka tidak perlu repot lagi. Pengumuman dapat langsung disiarkan dan dibagikan melalui website terkait. Bahkan pengumuman tersebut juga dapat diakses oleh warga desa setempat yang berada di luar negeri.
4. **Pasar online desa.** Sebagai media pengembang potensi desa, website juga dapat dijadikan sebagai pasar online desa. Yang dinamakan dengan pasar online,

maka website tersebut akan menyajikan keseluruhan potensi industri kreatif di desa. Di samping itu, pasar online desa juga dapat dijadikan sebagai media promosi segala hal yang ada di desa tersebut.

5. ***Alat komunikasi dua arah.*** Meskipun di desa yang umumnya memiliki wilayah cukup kecil, namun masih saja terdapat kendala komunikasi antara warga dengan pemerintahan desa. Hal seperti itu biasanya disebabkan karena warga sulit mengajukan keluhan yang mereka rasakan terkait dengan kinerja pemerintah desa. Oleh sebab itu, dengan adanya website desa diharapkan lebih mudah menampung aspirasi dan keluhan masyarakat desa setempat. Website untuk desa dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dua arah yang semakin mampu mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya.

Pengembangan desa, didalamnya dikenal dengan konsep *smart village*, tujuan dari konsep *smart village* ini untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan antara desa-desa yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Enrekang. Konsep ini bertujuan untuk menumbuhkan pertumbuhan yang ada di desa-desa sehingga mengatasi dan sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di desa. *Smart village* ini dapat dilakukan oleh setiap desa yang siap untuk menerapkan konsep ini.

Smart village merupakan sebuah konsepnya dan systemnya melalui smart system platform. *Smart system platform* memahami kebutuhan desa, dan melihat dari kebutuhan apa yang dibutuhkan di desa, kemudian kebutuhan desa di satukan dalam konsep desa cerdas yaitu ekonomi cerdas. Untuk menuju desa cerdas pemerintah desa dapat mengamati bagaimana

desa cerdas tersebut dapat di ambil. Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh setiap desa. Programnya diantaranya dengan aplikasi desa pintar yang dapat dimanfaatkan oleh desa adalah Desa Wisata.

PENUTUP

Pendekatan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai sarana dalam memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang potensi dan daya tarik wisata alam pegunungan, goa, air terjun, sungai, perkebunan yang ada di Kabupaten Enrekang. Terdapat 67 titik obyek wisata yang dapat Tim Peneliti identifikasi berdasarkan pada jawaban dari seluruh responden pada seluruh kecamatan di Kabupaten Enrekang. Potensi dan daya tarik lokasi wisata ini mempunyai keunikan tersendiri. Apabila digarap dan dikelola dengan baik, dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar dalam meningkatkan perekonomian dan membuka peluang lapangan pekerjaan dan usaha bagi masyarakat pada lokasi tersebut.

Hasil analisis spasial akhir menunjukkan bahwa daya tarik wisata Air Terjun Tattungo yang berlokasi di Desa Puncak Harapan Kecamatan Maiwa, merupakan prioritas utama dalam pengembangan wisata alam pegunungan di Kabupaten Enrekang pada bagian selatan. Untuk bagian Timur Enrekang menunjukkan bahwa daya tarik wisata persawahan terasering di Desa Salukanan, Desa Kendenan dan Desa Pemandangan di Kecamatan Baraka sebagai *iconic* untuk kawasan Timur Enrekang. Disamping persawahan terasering, potensi wisata pada bagian timur adalah Lo'ko Bubau di Desa Kadingeh. Kawasan Barat Enrekang, obyek agropolitan merupakan potensi daya tarik wisata yang cukup potensial. Pada kawasan ini, secara tipology masyarakat dan potensi wilayah merupakan perkebunan / pertanian. Selain potensi tersebut, berdasarkan pengamatan dari Tim Peneliti adalah pengembangan Taman Bunga Edelweiss terbesar di Dunia, khususnya di Kecamatan Masalle.

Beberapa arahan pengembangan wisata alam pegunungan Kabupaten Enrekang berdasarkan analisis SWOT yang telah disesuaikan

kan dengan hasil penilaian dan kondisi lapangan antara lain:

- a. Mengembangkan potensi keindahan bentang alam yang masih alami dan berbudaya sebagai daya tarik wisata alam yang berorientasi pasar berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan konsep wisata berkelanjutan yang berbasis 125 masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi desa sebagai sarana promosi dan menjalin kerja sama untuk meningkatkan investasi.
- b. Menyusun studi kelayakan (*feasibility study*) dan *master plan* masing-masing daya tarik wisata sebagai acuan untuk meminimalisir dampak negatif dan kerusakan lingkungan, adat istiadat masyarakat setempat.
- c. Menjadikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman pengembangan pariwisata berbasis pedesaan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi lahan dan konflik pemanfaatan lahan di kemudian hari.
- d. Menyusun Rencana Induk Penelitian Pariwisata Daerah (RIPPParDa) dan data base pariwisata sebagai pedoman dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
- e. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan serta workshop mengenai pariwisata berkelanjutan khususnya kepada kelompok sadar wisata (pokdarwis) sebagai pelaku usaha pariwisata yang berkonsep desa wisata berbasis digital.
- f. Memaksimalkan fungsi kelompok sadar wisata (pokdarwis) sebagai sarana pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi dan daya tarik wisata pada seluruh wilayah desa di Kabupaten Enrekang.

Dampak sosio kultural masyarakat di Kabupaten Enrekang sebagai salah satu potensi dalam peningkatan ekonomi dan pemberda-

yaan masyarakat lokal. Destinasi wisata perdesaan merupakan suatu peluang yang dapat dimaksimalkan dalam pertumbuhan ekonomi melalui Pendapatan Asli Desa (PADes). Implikasi terhadap upaya tersebut juga dapat membuka ruang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka diperoleh beberapa saran terkait pengembangan desa wisata. Peta Wisata di Kabupaten Enrekang dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata di Kabupaten Enrekang, terutama di daerah wisata alam pegunungan.

Peta Prioritas Pengembangan Wisata Alam di Kabupaten Enrekang tahun 2021 dapat menjadi acuan referensi dalam menentukan prioritas pengembangan desa wisata di Kabupaten Enrekang serta dapat berguna sebagai lampiran dalam proses legislasi Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata (RIPK) menjadi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPParDa) Kabupaten Enrekang. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang diharapkan dapat memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Desa (SID) atau berbasis digital (*web*) dalam mengembangkan pariwisatanya karena selain dapat memproduksi peta wilayah. Langkah tersebut juga dapat memuat beberapa konten dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Misalnya untuk meng-*update* data secara *real time*, mengelola arus pengunjung, permodelan spasial untuk mengkaji potensi dampak pembangunan pariwisata dan lain sebagainya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang harus berperan aktif untuk menggandeng masyarakat dan semua pihak untuk bersama-sama mengelola dan mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan keunikan yang dimiliki oleh potensi dan daya tarik wisata sehingga keunggulan-keunggulan komparatif yang ada dapat menjadi keunggulan kompetitif untuk mampu berdaya sanding dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi pada khususnya dan perekonomian daerah Kabupaten Enrekang pada umumnya.

Pengembangan desa wisata yang di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati baik berupa flora dan fauna endemik dilakukan dengan tetap menjaga dan melestarikannya agar terhindar dari kepunahan, salah satunya dengan ekowisata sebagai wujud dari *local wisdom*. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan melakukan update data serta kajian yang lebih mendalam dalam menentukan kriteria-kriteria penilaian, yang berpengaruh dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Merumuskan strategi yang tepat dan aplikatif serta sesuai dengan kriteria dan kondisi masing-masing potensi dan daya tarik wisata yang ada guna mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Enrekang.

Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang membuat regulasi sistem pada semua tingkatan sekolah di Kabupaten Enrekang untuk setiap akhir semester melakukan kunjungan wisata ke obyek wisata di sekitar sekolah tersebut. Selain itu, guru dan siswa dapat memformulasikan setiap kegiatan demikian pada setiap akhir semester dengan model belajar sambil berlibur. Kebun Raya Massenrempulu dijadikan icon di Kabupaten Enrekang pada sektor pariwisata dan edukasi dengan model pengembangan secara kolaboratif di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Enrekang, maupun Perguruan Tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat. **Come on Visiting Us “for wonderful experiences”** sebagai Tagline wisata di Kabupaten Enrekang, dimana Tagline tersebut memiliki arti **Ayo Kunjungi Kami “untuk pengalaman yang luar biasa”**.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. T., & Sihaloho, E. D. (2019). The Impact of Village Fund Program in Developing Physical Infrastructure: Case on Construction Value across Provinces in Indonesia. *Media Trend, 14*(2), 194-200.
- Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. *Heliyon, 5*(10), e02649.
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 village law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52*(2), 161-183.
- Atmoko, T. P. H. (2014). Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. *Jurnal Media Wisata, 12*(2), 146–154.
- Ayub, Z., Rianti, M., Awaluddin, M., & Triadi, F. (2020). Community Participation in Village Fund Management within Palakka District, Bone Regency of South Sulawesi, Indonesia. *GNOSI: An Interdisciplinary Journal of Human Theory and Praxis, 3*(3), 38-48.
- Bebbington, A., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2006). Local capacity, village governance, and the political economy of rural development in Indonesia. *World Development, 34*(11), 1958-1976.
- BPS Enrekang. (2019). *PDRB*. Kabupaten Enrekang. Indonesia.
- BPS Enrekang. (2020). *Enrekang dalam Angka*. Enrekang. Indonesia.

- Desi, N. (2021). Environmental Conservation Education: Theory, Model, and Practice. *Psychology and Education Journal*, 58(3), 1149-1162.
- Dewi, M. H. U., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139.
- Effendi, T. N. (2013). Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1), 1–18.
- Fitari, Y., & Ma`arif, S. (2017). Manfaat Pengembangan Desa Wisata Wonolopo terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Lokal. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 5(1), 29–44.
- Garrod, B. (2001). *Local Partisipation in the Planning and Management of Eco-tourism*. Bristol: University of the West of England.
- Halim, Hamid. (2018). Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Pelanggan Semen Baturaja di Palembang Pada PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. *Jurnal Ecoment Global*. Vol. 3 No.1 pp. 167-182.
- Handayani, A. P., & Badrudin, R. (2019). Evaluation of Village Fund Allocation on Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3), 283-295.
- Hehamahua, H. (2015). Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. *Journal of Social and Development Sciences*, 6(3), 15-23.
- Helmsing, A.H.J. (2003). *Local Economic Development: New Gene-*

rations of Actors, Policies and Instrument of Africa. Article in Public Administration and Development January 2003.

Herdiana, Dian. (2019). Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *JUMPA*. Vol. 3 No. 1 pp.63-86.

Karim, A. (2019). *Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Nas Media Pustaka, Makassar.

Karim, A. (2020). **Endemic Rice Pulu' Mandoti Supports the Economy and Food Security at Salukanan Community during Covid-19 Global Pandemic Crisis**. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*. Vol. 5, Issue 9, September 2020. ISSN:-2456-2165. Page 793 – 796.

Karim, A. (2020). *Indonesia's Economic Revival behind the Lockdown of 59 Countries*. International Journal of Scientific & Engineering Research Vol. 11, Issue 9, September-2020. ISSN 2229-5518. Page 1385 – 1388.

Karim, A., Musa, C. I., Sahabuddin, R., & Azis, M. (2021). The Increase of Rural Economy at Baraka Sub-District through Village Funds. *The Winners*, 22(1).

Khaliq, A., & Noy, I. (2007). Foreign direct investment and economic growth: Empirical evidence from sectoral data in Indonesia. *Journal of Economic Literature*, 45(1), 313-325.

Maddatuang, B., Sabara, Z., Wekke, I. S., & Karim, A. (2020). *Langkah Mewujudkan Insan Cita Pandangan Lintas Disiplin*. Penerbit Qiara Media.

Maddatuang, B., Syukur, A., Indar, S. H., & Karim, A. (2021). THE RURAL ECONOMIC GROWTH IN SOUTH SULAWESI DRIVES THE NATIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *International Journal of Management*

(IJM), 12(3).

- Nawawi, A. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok Di Desa Kretek Parangtritis. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 5(2), 103–109.
- Nugroho, A., Takahashi, M., & Masaya, I. (2021, January). Village fund asymmetric information in disaster management: Evidence from village level in Banda Aceh City. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 630, No. 1, p. 012011). IOP Publishing.
- Nurhidayanti, S., & Jumarding, A. (2020). ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN DI DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. *Economics Bosowa*, 6(003), 145-153.
- Paotonan, N., Ruslan, M., & Jumarding, A. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMASA, PROVINSI SULAWESI BARAT. *Economics Bosowa*, 7(003), 151-164.
- Purnamasari, A. M. (2011). Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata Di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 22(1), 49–64.
- Rahman, F. A. (2021). The Effectiveness for Regional Budget of Revenue and Expenditure as a Control Tools in Enrekang Regency Governments. *Saudi J Econ Fin*, 5(4), 173-179.
- Rizkianto, N., Topowijono. (2018). Penerapan Konsep Community Based Tourism Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi Pada Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 58(2), 20–26.

- Sendouw, R. (2014). The economic growth and the regional characteristics: the case of Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 16(1), 3-18.
- Siswantoro, H., Anggoro, S., & Sasongko, D. P. (2012). Strategi Optimasi Wisata Massal Di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Grojogan Sewu. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 10(2), 100–110.
- Sukirman, O. (2017). Apakah Anggaran Pemasaran Pariwisata Pemerintah Efektif dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan? (Studi Kasus di Indonesia Tahun 2011-2016). *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal*, 7(2), 121–128.
- Syafingi, H. M., Dewi, D. A. S., Suharso, H., Sulistyaningsih, P., & Rahmawati, U. (2020). Village fund optimization strategy for rural community welfare in Indonesia. *Journal of Critical Reviews*, 7(7), 580-583.
- Syahrudin, A. K. (2020). *The Role of Cooperatives in Economic Growth in Makassar City during the Covid-19 Pandemic*.
- Theng, S. (2015). Mass Tourism vs Alternative Tourism? Challenges and New Positionings. Retrieved February 21, 2019, from [https://journals.openedition.org/ etudescaribeennes/7708#authors](https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/7708#authors).
- Titi, D., & Sri, E. (2020). Strengthening village apparatus capacity in village development in Air Periukan Village, Seluma District Bengkulu Province, Indonesia. *Economics, Management and Sustainability*, 5(1).
- Trianggono, A., Wiloso, P. G., Sasongko, G. (2018). Pariwisata Dalam Perspektif Actor Network Theory (Studi Kasus Top Selvie Pinusan Kragilan Desa Pogalan, Jawa Tengah, Indonesia). *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(2), 91–104.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (1990). Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. *Jakarta. Indonesia.*

TENTANG PENULIS



Ahmad Jumarding, lahir di Enrekang, 15 November 1990, tamat di SDN 55 Maroangin 2003, selesai SMA pada tahun 2009. Studi jenjang S1 di Universitas 45 Makassar dan berhasil mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2013. Menyelesaikan program Magister tahun 2016 di Universitas Muslim Indonesia. Pada jenjang organisasi sebagai Pengurus HMI Komisariat Ekonomi Universitas 45, HMI Korkom Universitas 45, Pengurus HMI Cabang Makassar. Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (HmI) periode 2018-2020. Saat ini sebagai Dosen tetap di Universitas Bosowa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen.



Andi Arifuddin Mane, Lahir di Bantaeng, 07 Juli 1972. Tamat SD Inpres Banyorang tahun 1984, SMP Negeri Banyorang tahun 1987, SMA Negeri 1 Banteng tahun 1990. Menyelesaikan S1 di Universitas 45 Makassar tahun 1996, S2 di UNHAS tahun 2006 dan S3 UNHAS tahun 2015. Semasa aktif dalam dunia kampus pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI Komisariat EK-SAS tahun 1995. Ketua Korkom PTS HMI Cabang Makassar tahun 1996. Sejak dari tahun 2004 – sekarang menjadi Pengurus KAHMI Sulsel. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.



Misbahuddin, Lahir di Rappang, 08 Oktober 1971. Tamat SD dan SMP di Baranti kemudian menamatkan SMA 157 Rappang Kabupaten Sidrap, Jurusan Fisika tammat tahun 1990. Menyelesaikan studi S1 di STIM- LPI Makassar, Magister Agribisnis pada Tahun 2000 di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar. S3 Unhas Ilmu Ekonomi selesai tahun 2016. Perintis Gerakan karya Alternatif (saat ini kewirausahaan) bagi Calon Sarjana dan Sarjana se-Wilayah C (KTI) di IKIP Malang, 1994. Sekretasi HMI Komisariat STIM LPI tahun 1994. Intermediate Training HMI tahun 1996.



Abdul Karim, Lahir di Matarin, 25 Mei 1982. Tamat MIS Guppi Balombong tahun 1994, MTs Guppi Gandeng tahun 1997 dan Madrasah Aliyah Guppi Gandeng tahun 2000. Tamat S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas 45 tahun 2006, menyelesaikan S2 pada Program Magister di Universitas Muslim Indonesia tahun 2012, saat ini dalam tahap penyelesaian jenjang program doktor S3 di Universitas Negeri Makassar. Pada jenjang organisasi ekstra kampus pernah Ketua Umum HMI Komisariat Ekonomi Universitas 45, Ketua Bidang PTKP Korkom Universitas 45, Ketua Umum HMI Cabang Makassar dan Wakjend PB-HMI.